

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(IPM), PENDAPATAN PER KAPITA, DAN
PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI
EKS KARESIDENAN PATI TAHUN 2015-2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

SINTIYA WATI

NIM: 2105026029

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Sintiya Wati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Sintiya Wati

NIM : 2105026029

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Per Kapita, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Saekhu M.H.
NIP. 196901201994031004

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing II

Mashlail M.Si.
NIP. 198405162019031005

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Sintiya Wati

NIM : 2105026029

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Per Kapita dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023”

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal: 25 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 10 Juli 2025

Ketua Sidang

Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., A.Kt.
198001282008011010

Sekretaris Sidang

Dr. Saekhu, M.H.
196901201994031004

Penguji Utama I

Siti Nurngaini, S.Sos.I., M.Si.
198312012015032004

Penguji Utama II



Dr. Wasvith, M.E.I.
198204182015031002

Pembimbing I

Dr. Saekhu, M.H.
196901201994031004

Pembimbing II

Mashilal, M.Si.
198405162019031005

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, yang telah memudahkan dan melancarkan proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, yang kelak akan memberikan syafaatnya di hari akhir kepada seluruh umat beliau. Dengan penuh penghargaan dan ketulusan hati, penulis mendedikasikan karya ini kepada semua pihak yang telah menjadi sumber semangat, dorongan, dan inspirasi selama proses penulisan skripsi ini. Sebagai bentuk rasa terima kasih yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada ayah dan ibu tercinta, Bapak Rasiman dan Ibu Warsini, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas cinta, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Kalian adalah sumber semangat dan kekuatan utama dalam hidup ini.
2. Kepada kakak tersayang, Agus Riyanto, beserta istri tercinta, Mulyanti, terima kasih atas perhatian, dorongan, dan motivasi yang begitu berarti dalam setiap proses yang penulis jalani hingga titik ini.
3. Kepada seluruh anggota besar, terimakasih atas doa-doa dan dukungan yang telah menjadi penyemangat untuk terus maju dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada sahabat dan teman seperjuangan, yang telah menemani perjalanan kuliah ini dengan canda tawa, semangat, serta bantuan yang begitu berarti.
5. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah kuat menghadapi segala rintangan dan tetap bertahan meskipun banyak kesulitan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Nama : Sintiya Wati
NIM : 2105026029
Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 26 Mei 2025

Deklarator



Sintiya Wati

NIM.2105026029

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal yang sangat penting saat menulis skripsi karena banyak istilah berbahasa Arab, seperti nama orang, judul buku, nama lembaga, dan sebagainya, ditulis dalam huruf Arab dan harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk memastikan bahwa tulisan tetap konsisten, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi yang baku, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

- َ = a

- ِ = i

- ُ = u

C. Diftong

- آ = ay

- أ = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya **الطّب** *al-thibb*.

E. Kata Sandang (ال)

Kata sandang (ال) ditulis dengan *al*.... misalnya **الصناعة** = *al-shina 'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan “h” misalnya = **الطبيعية المعيشة** *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu sentral di kawasan Eks Karesidenan Pati. Beberapa penyebab yang turut mendorong tingginya tingkat kemiskinan di wilayah ini meliputi mutu sumber daya manusia yang masih rendah, minimnya pendapatan per kapita, serta tingginya angka pengangguran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Per Kapita, dan Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan di wilayah tersebut selama rentang waktu 2015 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel, dan pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 13. Sumber data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah serta BPS kabupaten/kota yang berada dalam wilayah penelitian. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa variabel IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi IPM, maka angka kemiskinan cenderung menurun. Sementara itu, variabel Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Pengangguran tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Kesimpulan dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup melalui penguatan dimensi pembangunan manusia menjadi kunci utama dalam strategi pengurangan kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Pati.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Per Kapita, Pengangguran, Kemiskinan.

ABSTRACT

Poverty is still a central issue in the former Pati Residency area. Several causes that contribute to the high poverty rate in this area include the low quality of human resources, low per capita income, and high unemployment rates. This study was conducted to determine the extent to which the Human Development Index (HDI), Per Capita Income, and Unemployment Rate influence poverty in the area during the period 2015 to 2023. This study uses a quantitative method with a panel data regression approach, and data processing is carried out using EViews 13 software. Data sources were obtained from official publications of the Central Statistics Agency (BPS) of Central Java Province and BPS districts/cities located in the research area. From the results of the analysis, it was found that the HDI variable has a negative and significant relationship with the poverty rate. This means that the higher the HDI, the poverty rate tends to decrease. Meanwhile, the Per Capita Income and Unemployment Rate variables do not have a statistically significant effect on poverty. The conclusion of these findings shows that improving the quality of life through strengthening the human development dimension is the main key in the poverty reduction strategy in the former Pati Residency area.

Keywords: Human Development Index, Per Capita Income, Unemployment, Poverty.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan penuh rasa syukur. Skripsi yang berjudul *“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Per Kapita, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati Tahun 2015–2023”* ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini dapat tersusun dengan baik berkat bantuan, arahan, serta dukungan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran mereka. Sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis dengan tulus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Ferry Khusnul Mubarak, M.A., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Saekhu M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Mashilal, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Saekhu, M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan selama masa studi penulis.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Program Studi Ekonomi Islam, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasi selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rasiman dan Ibu Warsini, yang senantiasa mendoakan, mendukung, serta memberikan kasih sayang dan pengorbanan tanpa batas dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, dorongan, serta motivasi kepada penulis.

Semoga segala bentuk bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semarang, 26 Mei 2025

Sintiya Wati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Kajian Teori	18
2.2 Kemiskinan.....	21
2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	29
2.4 Pendapatan Per Kapita.....	34

2.5 Pengangguran	36
2.6 Penelitian Terdahulu	39
2.7 Kerangka Pemikiran	59
2.8 Hipotesis	60
BAB III METODE PENELITIAN	63
3.1 Jenis Penelitian	63
3.2 Populasi dan Sampel.....	63
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	64
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.5 Metode Analisis Data	67
BAB IV PEMBAHASAN.....	73
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	73
4.2 Tabulasi Data Variabel.....	74
4.3 Pengujian dan Hasil Analisis Data	76
4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	76
4.3.2. Analisis Data.....	77
4.3.3. Uji Signifikansi/Uji Hipotesis.....	87
4.4 Pembahasan.....	91
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2023.....	1
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	64
Tabel 4.1 Data Tingkat Kemiskinan di eks Karesidenan Pati 2015–2023 (persen)	74
Tabel 4.2 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di eks Karesidenan Pati 2015-2023 (persen)	74
Tabel 4.3 Data PDRB Per Kapita di Karesidenan Pati 2015-2023 (ribu rupiah) ...	75
Tabel 4.4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Karesidenan Pati 2015-2023 (persen).....	75
Tabel 4. 5 Uji Analisis Deskriptif.....	76
Tabel 4.6 Hasil Uji Common Effect.....	78
Tabel 4.7 Hasil Uji Fixed Effect.....	79
Tabel 4.8 Hasil Uji Random Effect Model.....	80
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow	82
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausmant	84
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	86
Tabel 4.12 Uji Hipotesis.....	87
Tabel 4. 13 Hasil Uji F	88
Tabel 4.14 Hasil Uji t	89
Tabel 4.15 Hasil Uji Determinasi.....	90

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Tingkat Kemiskinan di Karesidenan Jawa Tengah Tahun 2015-2023 (persen).....	4
Grafik 1.2 Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023 (persen).....	6
Grafik 1.3 Data Indeks Pembangunan Manusia di eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023 (persen)	9
Grafik 1.4 Data PDRB Per kapita di eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023	11
Grafik 1.5 Data Tingkat Pengangguran Terbuka di eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023 (persen)	13
Grafik 4.1 Hasil Uji Normalitas	86
Grafik 4.2 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Formal dan Informal di Jawa Tengah	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian.....	108
Lampiran 2: Analisis Deskriptif.....	109
Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik.....	109
Lampiran 4: Uji Hipotesis	110
Lampiran 5: Uji Regresi Data Panel	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah isu penting dalam kemajuan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai persoalan kemanusiaan, kemiskinan menghalangi kesejahteraan dan peradaban. Dalam hal ini, kemiskinan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan di suatu negara. Semakin sedikit jumlah orang miskin, semakin baik perkembangan suatu negara; sebaliknya, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat kemajuan.¹

Di Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam perekonomian. Isu ini meliputi kenaikan angka pengangguran, inflasi, dan kesulitan akses pendidikan bagi anak-anak. Kemiskinan yang berkepanjangan juga memaksa banyak masyarakat desa untuk mengorbankan segala hal demi bertahan hidup, bekerja keras namun mendapatkan imbalan yang sangat rendah.² Berikut merupakan Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2015-2023.

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2023

No	Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu)
1	2015	28.592,83
2	2016	28.005,39
3	2017	27.771,22
4	2018	25.949,80
5	2019	25.144,72
6	2020	26.424,02
7	2021	27.542,77
8	2022	26.161,16
9	2023	25.898,55

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2024

¹ Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): 217–40, <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p04>.

² Elviani Veronica Isabella, "Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Tingkat Pengangguran (TPT), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2012-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Berdasarkan tabel 1.1 data jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2015 hingga 2023, terlihat bahwa angka kemiskinan nasional mengalami tren penurunan secara umum. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 28,59 juta jiwa, kemudian menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2019 sebesar 25,14 juta jiwa. Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan menjadi 26,42 juta jiwa sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian nasional. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 27,54 juta jiwa, sebelum akhirnya mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 hingga mencapai 25,89 juta jiwa. Data ini menunjukkan bahwa meskipun secara jangka panjang tren kemiskinan menurun, guncangan ekonomi seperti pandemi memiliki dampak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sehingga dibutuhkan strategi penanggulangan kemiskinan yang adaptif dan berkelanjutan.

Situasi ini merupakan masalah yang memiliki banyak aspek, dan berbagai metode yang digunakan untuk membedakannya. Akibatnya, setiap upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat harus disertai dengan upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan itu sendiri. Namun, yang menjadi perhatian adalah bahwa konsep kemiskinan tidak hanya dalam pengertian sempit, yaitu bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi namun juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik sebagai sumbernya. Kemiskinan telah mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat dalam berbagai cara. Meskipun kemiskinan ada pada setiap orang, itu tidak berarti bahwa itu adalah tanggung jawab setiap orang. Sebaliknya, itu harus menjadi tanggung jawab seluruh bangsa atau stakeholder untuk mengatasi masalah ini.³

Permasalahan yang menghambat kelompok miskin sehingga mereka tidak dapat keluar dari kondisi kemiskinan adalah kurangnya modal dan kemandirian. Kekurangan dan ketergantungan pada sumber finansial menghalangi mereka untuk mengembangkan usaha. Menurut Muhammad Yunus, solusi yang dihadirkan oleh lembaga resmi dunia maupun pemerintah kurang berhasil karena

³ Atma Ras, "Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan," *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* 11, no. 2 (2013): 233, <https://doi.org/10.21154/cendekia.v11i2.278>.

mereka melihat kemiskinan dalam skala besar dengan program yang bersifat global juga. Namun, yang sebenarnya dibutuhkan adalah program yang benar-benar mendukung mereka seperti, bimbingan, penyediaan modal, dan pengembangan jaringan usaha.⁴

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan, namun upaya tersebut sejauh ini belum membuahkan hasil yang optimal. Berbagai rencana strategis telah dirancang dan dijalankan dari tahun ke tahun dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan, tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memang memperlihatkan tren penurunan secara kuantitatif, namun jika ditinjau dari sisi kualitatif, dampak nyata dari penurunan tersebut belum sepenuhnya terasa. Kondisi kemiskinan di Indonesia bahkan cenderung semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan ini.⁵

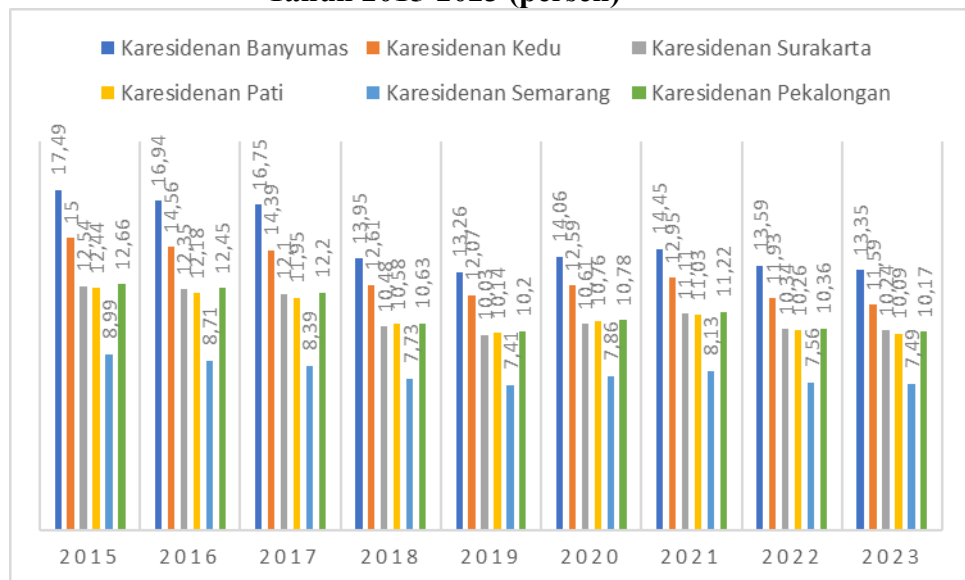
Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya terbatas pada persoalan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi isu fundamental yang secara langsung menghambat jalannya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Meski statistik nasional menunjukkan adanya tren penurunan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu 2015 hingga 2023, kondisi tersebut tidak serta-merta menggambarkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah. Perbedaan karakteristik wilayah, kapasitas fiskal daerah, dan akses terhadap pelayanan publik menyebabkan ketimpangan antarwilayah masih sangat terasa, termasuk di Provinsi Jawa Tengah.

⁴ Nur Fatoni, "Peran Misykat (Micro Finance Syari'ah) DPU (Dompot Peduli Umat) Daaryt Tauhid Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* V (2014): 77–92.

⁵ Martiyan Ramdani, "Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012," *Economics Development Analysis Journal* 4, no. 1 (2015): 58–64.

Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terbagi ke dalam beberapa karesidenan menunjukkan dinamika kemiskinan yang beragam.⁶ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), setiap karesidenan menunjukkan kecenderungan dan pola yang berbeda dalam perkembangan tingkat kemiskinannya. Karesidenan Banyumas dan Surakarta, misalnya, menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang relatif stabil selama hampir satu dekade terakhir. Sebaliknya, Karesidenan Semarang memperlihatkan gejala ketimpangan internal yang cukup tajam, terutama akibat disparitas antara wilayah perkotaan yang maju seperti Kota Semarang dan Salatiga dengan wilayah kabupaten yang cenderung tertinggal. Di tengah variasi tersebut, Karesidenan Pati menempati posisi moderat angka kemiskinannya tidak tergolong paling tinggi, namun juga tidak mengalami penurunan signifikan secara konsisten dari tahun ke tahun. Fenomena ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang masih belum sepenuhnya teratasi oleh kebijakan pembangunan daerah. Berikut Grafik Tingkat Kemiskinan di Karesidenan Jawa Tengah Tahun 2015–2023.

Grafik 1.1 Tingkat Kemiskinan di Karesidenan Jawa Tengah Tahun 2015-2023 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2024

⁶ Karesidenan adalah pembagian wilayah administratif di Jawa Tengah yang berlaku sejak masa kolonial hingga sekitar tahun 1950-an. Meskipun sudah tidak digunakan secara resmi, pembagian karesidenan masih relevan dalam konteks penelitian karena menggambarkan kesamaan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis antar kabupaten di dalamnya

Berdasarkan grafik 1.1 tingkat kemiskinan antar karesidenan di Jawa Tengah tahun 2015–2023, Karesidenan Banyumas tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi hampir sepanjang periode. Meskipun mengalami penurunan, wilayah ini tetap berada di posisi atas, menunjukkan bahwa beban kemiskinan struktural masih cukup kuat.

Sebaliknya, Karesidenan Semarang menunjukkan tingkat kemiskinan paling rendah dibandingkan wilayah lain. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh wilayah perkotaan seperti Kota Semarang dan Salatiga yang memiliki infrastruktur dan perekonomian lebih maju dibanding kabupaten lain.

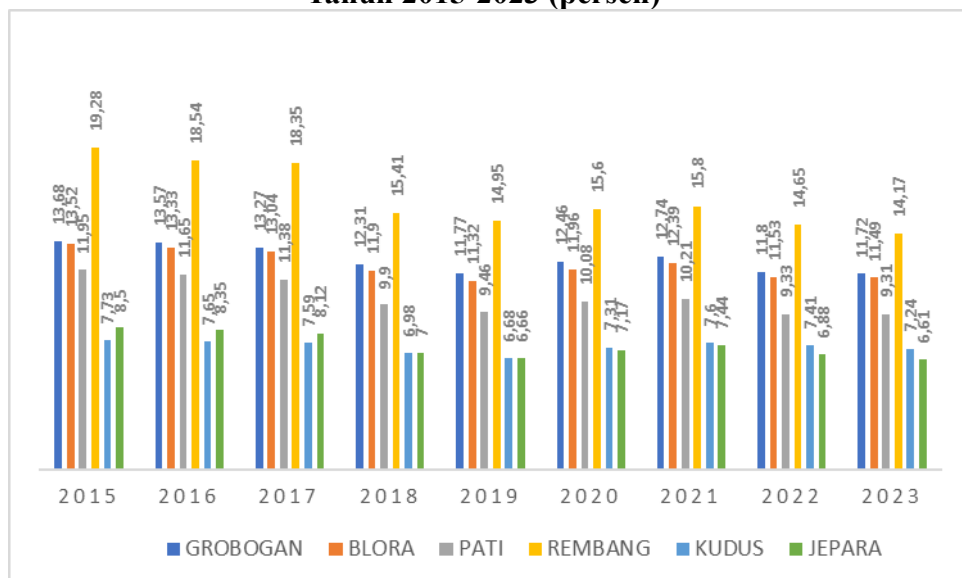
Sementara itu, Karesidenan Pati berada di posisi menengah, dengan tren penurunan kemiskinan yang cenderung lambat dan stagnan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun bukan yang paling miskin, wilayah ini menghadapi tantangan tersendiri yang menjadikannya relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Meskipun bukan merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, Karesidenan Pati justru memiliki urgensi tersendiri untuk dijadikan sebagai fokus penelitian. Hal ini dikarenakan wilayah ini mengalami kecenderungan stagnasi dalam penurunan tingkat kemiskinan selama sembilan tahun terakhir, berbeda dengan beberapa karesidenan lain yang menunjukkan perbaikan signifikan. Wilayah ini meliputi kabupaten-kabupaten seperti Grobogan, Pati, Rembang, Blora, Kudus, dan Jepara, yang sebagian besar perekonomiannya bergantung pada sektor informal, khususnya pertanian dan perikanan. Keterbatasan diversifikasi ekonomi, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum meratanya akses terhadap pendidikan dan layanan publik menjadi tantangan serius yang menghambat pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Selain itu, penelitian yang berfokus pada wilayah ini relatif masih terbatas dibandingkan dengan kajian di wilayah lain seperti Karesidenan Semarang atau Surakarta, yang memiliki peran strategis dalam konteks administratif dan ekonomi Jawa Tengah. Oleh karena itu, menempatkan Karesidenan Pati sebagai objek kajian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dalam

memperkaya literatur akademik sekaligus mendukung formulasi kebijakan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan lokal.

Di sisi lain, kemiskinan di Eks Karesidenan Pati tetap menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian serius, mengingat wilayah ini mencakup enam kabupaten, yakni Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, dan Jepara. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak sekadar diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, tetapi juga mencerminkan minimnya perlindungan sosial, keterbatasan akses layanan dasar, serta lemahnya intervensi negara terhadap kelompok rentan. Data yang tersedia menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kawasan ini masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan provinsi. Permasalahan ini diperparah oleh sejumlah faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan, ketimpangan dalam distribusi fasilitas kesehatan, serta tingginya angka pengangguran terbuka yang menyebabkan masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Berikut merupakan Grafik 1.2 Data Tingkat Jumlah Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023 (persen)

**Grafik 1.2 Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati
Tahun 2015-2023 (persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2024

Berdasarkan Grafik 1.2 data tingkat kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Pati tahun 2015 hingga 2023, Kabupaten Rembang secara konsisten memiliki

tingkat kemiskinan tertinggi, dengan angka mencapai 19,28 persen pada tahun 2015 dan masih berada di posisi teratas pada tahun 2023 dengan 14,17 persen. Sementara itu, Kabupaten Kudus menjadi yang paling rendah dari tahun 2015 hingga 2018, dengan angka terendah 6,98 persen pada 2019. Namun, sejak tahun 2020 hingga 2023, posisi tingkat kemiskinan terendah beralih ke Kabupaten Jepara, dengan capaian terbaik sebesar 6,61 persen pada 2023. Perpindahan ini menunjukkan adanya keberhasilan Jepara dalam memperbaiki kondisi sosial ekonominya, sekaligus menegaskan adanya disparitas kesejahteraan antarwilayah, terutama jika dibandingkan dengan Rembang yang tertinggal cukup jauh.

Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun ada tren penurunan, disparitas antar kabupaten di Eks Karesidenan Pati masih cukup tinggi, yang mencerminkan ketimpangan dalam distribusi pembangunan dan efektivitas penanggulangan kemiskinan di wilayah ini.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dominan yang mendorong tingginya tingkat kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berfungsi sebagai indikator komprehensif dalam mengevaluasi kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM tidak hanya mencerminkan tingkat capaian pembangunan manusia, tetapi juga menggambarkan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif dan layak. Ketika IPM menurun, hal tersebut sering kali menjadi sinyal melemahnya kapasitas tenaga kerja, baik dari sisi keterampilan, produktivitas, maupun daya saing. Kondisi ini secara langsung dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat serta memperbesar risiko meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, upaya peningkatan IPM menjadi strategi krusial dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun taraf hidup secara umum. IPM merupakan alat yang efektif untuk mengukur dan membandingkan capaian pembangunan manusia, baik

antarnegara maupun antardaerah. Indeks ini juga mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Masyarakat yang sehat, terdidik, dan produktif cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Sebaliknya, rendahnya IPM biasanya berkorelasi dengan rendahnya produktivitas, yang pada akhirnya memperbesar jumlah penduduk miskin.⁷

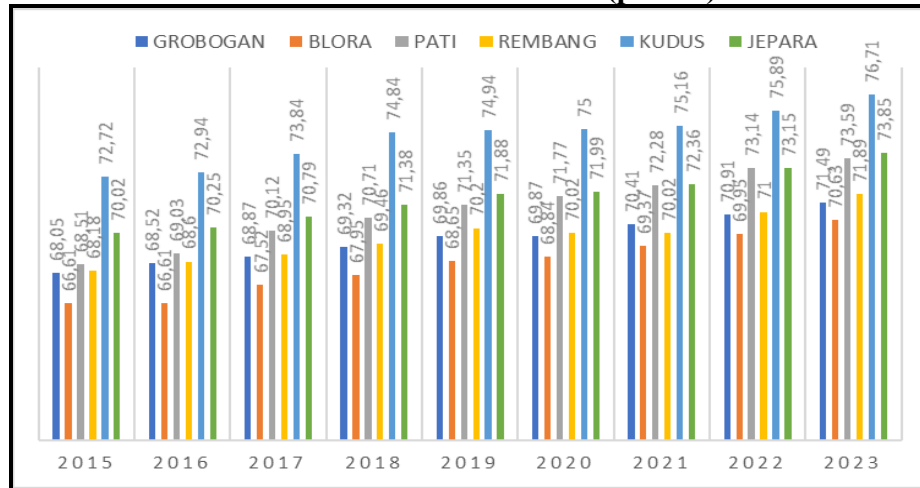
Mulyadi mengemukakan bahwa peningkatan mutu sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui penerapan berbagai kebijakan strategis yang terencana. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui pembangunan sektor pendidikan yang diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan ekonomi di masa depan, sehingga lulusan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pasar kerja dan dinamika ekonomi.

Di samping itu, sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas utama dalam rangka menciptakan kualitas hidup yang optimal. Mulyadi menegaskan bahwa upaya ini dapat dilakukan melalui promosi pola hidup sehat di tengah masyarakat serta peningkatan akses dan jangkauan pelayanan kesehatan secara merata. Dengan demikian, kebijakan yang sinergis di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi kunci utama dalam menciptakan manusia yang produktif dan berdaya saing tinggi.⁸ Berikut merupakan Grafik 1.3 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Karesidenan Pati tahun 2015-2023.

⁷ Nurjannah, Lapeti Sari, and Indri Yovita, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2002-2021," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 567–74.

⁸ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Grafik 1.3 Data Indeks Pembangunan Manusia di eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2024*

Berdasarkan Grafik 1.3 Kabupaten Kudus secara konsisten mencatatkan IPM tertinggi selama periode 2015–2023. Dimulai dari 72,72% pada tahun 2015, IPM Kudus terus meningkat hingga mencapai 76,71% pada tahun 2023, menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang paling unggul, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Sebaliknya, Kabupaten Blora memiliki IPM terendah sepanjang periode tersebut. IPM Blora hanya sebesar 66,61% pada 2015 dan meningkat menjadi 70,63% pada tahun 2023, namun tetap menjadi yang paling rendah di antara enam kabupaten.

Kabupaten lain seperti Jepara dan Pati menunjukkan tren peningkatan IPM yang stabil. Pati, misalnya, meningkat dari 68,51% pada 2015 menjadi 73,59% pada 2023, sedangkan Jepara naik dari 70,02% menjadi 73,85%. Grobogan dan Rembang juga mengalami perbaikan, tetapi masih berada di bawah Kudus dan Jepara.

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sofilda dkk. menemukan bahwa meningkatkan IPM dapat menurunkan tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten

dan kota di Provinsi Papua, menunjukkan bahwa pembangunan kualitas manusia benar-benar berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.⁹ Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Suliswanto, yang mengungkapkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.¹⁰

Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah eks Karesidenan Pati adalah tingkat pendapatan per kapita. Menurut Siregar dan Ritonga, pendapatan per kapita menunjukkan penghasilan rata-rata penduduk dalam suatu daerah. Pendapatan per kapita cenderung meningkat seiring dengan peningkatan produksi barang dan jasa; ini pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu mengurangi kemiskinan.

Peningkatan ini sering kali dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampak positif tersebut lebih nyata di daerah dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata. Dengan ketimpangan pendapatan yang rendah, pembangunan ekonomi didistribusikan secara merata ke seluruh populasi. Dalam hal ini, tidak ada kelompok yang memonopoli keuntungan dari pertumbuhan ekonomi, sebaliknya, kelompok lain hanya menikmati bagian kecil dari keuntungan tersebut.¹¹

Tingkat pendapatan seseorang sangat memengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan ini mencakup baik konsumsi makanan maupun non-makanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudanto et al. mengungkapkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat konsumsi rumah tangga, baik dalam kategori rumah tangga berpendapatan rendah maupun tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa

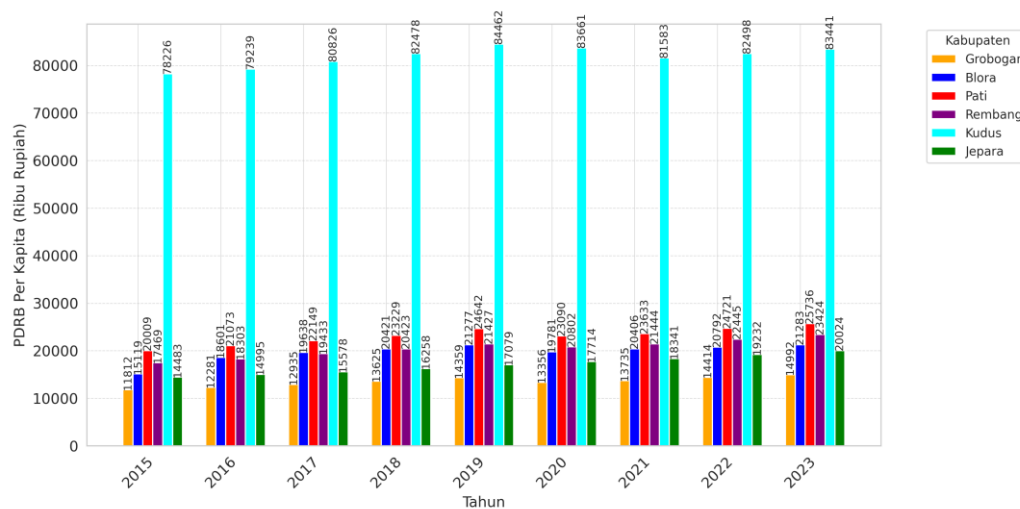
⁹ Eleonora Sofilda, Muhammad Zilal Hamzah, and Arip Syaman Sholeh, "Human Development and Poverty In Papua Province (An Analysis Of Simultaneous Approach On Panel Data Regression)" *OIDA International Journal of Sustainable Development* 06, no. 06 (2013): 51–62.

¹⁰ Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, "Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)," *Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia* 8, no. 2 (2010): 359.

¹¹ Nurintan Aisyah Siregar and Zuriani Ritonga, "Analisis Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Labuhanbatu," *Jurnal Informatika* 6, no. 1 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.36987/informatika.v6i1.736>.

peningkatan pendapatan cenderung mendorong peningkatan pola konsumsi masyarakat di berbagai kelompok ekonom. Dengan meningkatnya pendapatan, masyarakat memiliki daya beli yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, kesejahteraan cenderung meningkat, sementara tingkat kemiskinan berkurang.¹² Berikut merupakan Grafik 1.4 Data PDRB Per kapita di eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023.

Grafik 1.4 Data PDRB Per kapita di eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2024

Berdasarkan grafik 1.4 data PDRB per kapita di wilayah Eks Karesidenan Pati tahun 2015 hingga 2023, terlihat bahwa Kabupaten Kudus secara konsisten mencatatkan nilai PDRB per kapita tertinggi dengan selisih yang sangat jauh dibanding kabupaten lainnya. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kudus sebesar Rp78.226 ribu, dan mencapai Rp83.441 ribu pada tahun 2023, menunjukkan kekuatan ekonomi yang didorong oleh sektor industri dan perdagangan.

Sementara itu, Kabupaten Grobogan memiliki PDRB per kapita terendah selama periode tersebut, yakni sebesar Rp11.812 ribu pada 2015 dan hanya meningkat menjadi Rp14.992 ribu pada 2023. Peningkatan yang relatif lambat ini mencerminkan masih rendahnya produktivitas ekonomi daerah. Secara umum,

¹² Daru Yudanto, Rochaida, and Priyagus, "Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Inflasi Serta Suku Bunga Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Makanan Dan Non Makanan Serta Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat The Effect of Income per Capita and Inflation and Interest Rates on Household Consumption" 17, no. 2 (2020): 287–97.

seluruh kabupaten menunjukkan tren peningkatan, namun kesenjangan antardaerah sangat nyata, khususnya antara Kudus dan kabupaten lain seperti Grobogan dan Jepara, yang menunjukkan bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Pati masih belum merata.

Faktor lain penyebab kemiskinan di wilayah eks Karesidenan Pati adalah tingginya tingkat pengangguran. Ketika banyak masyarakat tidak memiliki pekerjaan, maka pendapatan mereka akan menurun, yang pada akhirnya turut menurunkan tingkat kesejahteraan yang telah dicapai sebelumnya. Kondisi ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Pertumbuhan angkatan kerja yang berlangsung cepat menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian daerah, karena menuntut adanya penciptaan atau perluasan lapangan pekerjaan yang memadai. Apabila jumlah peluang kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan, maka tingkat pengangguran akan tetap tinggi. Dumairy menegaskan bahwa situasi semacam ini dapat menjadi penghambat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, sekaligus memperparah kondisi kemiskinan yang terjadi dalam suatu wilayah.¹³

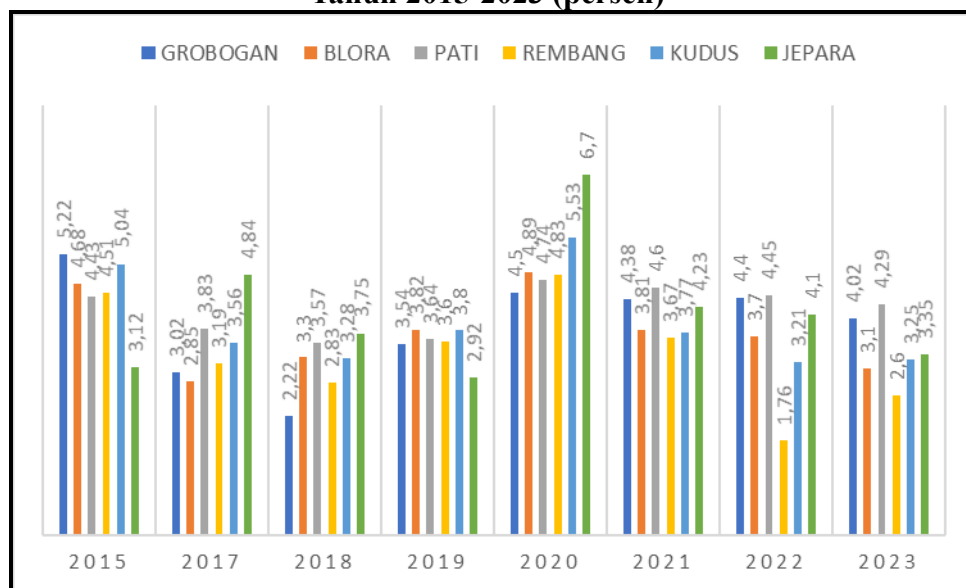
Menurut Lundahl, jumlah lapangan kerja harus ditingkatkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi menunjukkan peningkatan angkatan. Jika tidak, kemiskinan akan meningkat dalam jangka panjang.¹⁴ O'Campo sependapat dengan Lundahl, menyatakan bahwa pengangguran secara langsung berdampak pada peningkatan kemiskinan.¹⁵ Berikut merupakan Grafik 1.5 Data Tingkat Pengangguran Terbuka di eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023.

¹³ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996).

¹⁴ Lundahl, *Poverty: No Place Is Too Exalted for The Preaching of These Doctrines* (Routledge, 2005).

¹⁵ Patricia O'Campo et al., "Social Welfare Matters: A Realist Review of When, How, and Why Unemployment Insurance Impacts Poverty and Health," *Social Science & Medicine* 132 (20115): 88–94.

Grafik 1.5 Data Tingkat Pengangguran Terbuka di eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023 (persen)



Sumber Badan Pusat Statistik diolah, 2024

Berdasarkan Grafik 1.5 data tingkat pengangguran terbuka di wilayah Eks Karesidenan Pati selama periode 2015 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi yang cukup dinamis antar kabupaten. Pada tahun 2015, Kabupaten Grobogan mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 5,22 persen, sedangkan Jepara mencatat angka terendah sebesar 3,12 persen. Tahun 2016 tidak tersedia dalam data karena Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mempublikasikan data pengangguran terbuka tingkat kabupaten/kota untuk tahun tersebut. Pada tahun 2017, Jepara mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 4,84 persen, sedangkan terendah adalah Blora sebesar 2,85 persen. Tahun 2018, Jepara masih tertinggi dengan 3,75 persen dan Grobogan menjadi yang terendah dengan 2,22 persen. Tahun 2019, Blora mencatat pengangguran tertinggi sebesar 3,82 persen, sementara Jepara kembali menjadi terendah dengan 2,92 persen.

Pada masa pandemi tahun 2020, Jepara mengalami lonjakan tertinggi hingga 6,70 persen, dan Grobogan mencatatkan tingkat terendah sebesar 4,50 persen. Tahun 2021, Pati menjadi tertinggi dengan 4,60 persen, dan Rembang terendah dengan 3,67 persen. Pola serupa terjadi di tahun 2022 dan 2023, di mana Pati tetap mencatat tingkat pengangguran tertinggi berturut-turut sebesar 4,45

persen dan 4,29 persen, sedangkan Rembang menjadi yang terendah dengan 1,76 persen pada 2022 dan 2,60 persen pada 2023. Data ini mencerminkan bahwa pengangguran di wilayah ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi makro nasional seperti pandemi, tetapi juga oleh dinamika sektor unggulan dan kapasitas penyerapan tenaga kerja di masing-masing daerah.

Sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang kemiskinan. Beberapa penelitian utama, seperti penelitian Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia mempengaruhi kemiskinan secara langsung dan negatif.¹⁶ Namun, menurut studi Sindi Rahayu Siputahar dan Adanan Murroh Nasution, indeks pembangunan manusia secara parsial tidak mempengaruhi kemiskinan.¹⁷ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Murbanto Sinaga et al., pendapatan per kapita memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.¹⁸ Namun, penelitian oleh Muhammad Aziz Maulana dan Aan Julia menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak dipengaruhi oleh pendapatan perkapita.¹⁹ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andris Imania Oktavian et al., pengangguran mempengaruhi kemiskinan.²⁰ Namun, menurut penelitian Ida Syafa'atur Rohmah, pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia,**

¹⁶ Prasetyoningrum, *Analisis...*, h.236.

¹⁷ Sindi Rahayu Siputahar and Adanan Murroh Nasution, “Pengaruh IPM, PDRB Perkapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara,” *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023).

¹⁸ Sinaga et al., *Pengaruh...*, h.138.

¹⁹ Muhamad Azis Maulana and Aan Julia, “Pengaruh Indeks Pendidikan, Gini Rasio, Jumlah Penduduk, Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Enam Provinsi Indonesia Tahun 2015-2019,” *Bandung Conference Series: Economics Studies* 2, no. 1 (2022): 17–24, <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.300>.

²⁰ Andris Imania Oktavian, Fivien Muslihatinningsih, and Endah Kurnia Lestari, “Pengaruh IPM, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2017-2021,” *Jurnal Ekuilibrium* 7, no. 1 (2023): 28, <https://doi.org/10.19184/jek.v7i1.33085>.

²¹ Ida Syafa'atur Rohmah and Jalu Aji Prakoso, “Pengaruh Ipm, Rls, Tpt, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat,” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, no. 6 (2022): 255–66, <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.294>.

Pendapatan Per Kapita, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di eks Karesidenan Pati Tahun 2015-2023.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati tahun 2015-2023.
2. Apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati tahun 2015-2023.
3. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati tahun 2015-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati tahun 2015-2023.
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan per kapita terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati tahun 2015-2023.
3. Untuk menguji pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati tahun 2015-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam. Dengan menyajikan bukti empiris terkait pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita, serta tingkat pengangguran terhadap kemiskinan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi studi-studi selanjutnya yang membahas kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai dasar dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan, fokus harus diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan manfaat pembangunan.

b) Bagi Penulis

Sebagai alat untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan teori-teori ekonomi Islam dan ekonomi pembangunan pada analisis empiris, serta sebagai persiapan akademis untuk masa depan.

c) Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber rujukan dan landasan untuk pengembangan penelitian sejenis di masa depan, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan pembangunan daerah, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama membahas secara rinci mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan alur sistematika penulisan sebagai panduan dalam memahami keseluruhan isi skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, serta kajian teoritis yang digunakan untuk menganalisis masing-masing variabel yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan, serta pembahasan mendalam terhadap temuan yang diperoleh, yang dihubungkan kembali dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang disusun berdasarkan hasil temuan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya maupun kebijakan yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

1. Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori modal manusia yang diperkenalkan oleh Becker menekankan bahwa individu merupakan aset krusial dalam pembangunan ekonomi, bukan hanya sekadar sumber daya. Dalam perspektif ini, peran manusia sangat penting dalam proses penciptaan barang dan jasa. Becker berargumen bahwa investasi dalam pendidikan dan keterampilan manusia akan menghasilkan peningkatan produktivitas dan inovasi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, pengembangan modal manusia menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan.²² Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kualitas manusia, terutama melalui pendidikan dan kesehatan, menjadi fondasi utama untuk mendorong kemajuan pembangunan manusia yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan output nasional. Peningkatan kapasitas manusia, baik dalam aspek keterampilan maupun kesehatan, dianggap sebagai modal yang secara langsung mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi.

Upaya pengembangan modal manusia secara nyata diwujudkan melalui penguatan pendidikan formal serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam kaitannya, teori modal manusia memperkenalkan dua pendekatan penting, yakni pendekatan Nelson-Phelps dan pendekatan Lucas. Pendekatan Nelson-Phelps menyoroti pentingnya tenaga kerja yang terdidik dan terampil dalam mempercepat adopsi inovasi teknologi, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Aghion dan Howitt juga mendukung gagasan ini dengan menyatakan bahwa pekerja berpendidikan lebih tinggi akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan pasar tenaga kerja.

²² Gerry Becker, *Human Capital; a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (New York: the National Bureau of Economic Research, 1993).

Sementara itu, pendekatan yang dikembangkan oleh Lucas lebih menekankan pentingnya akumulasi modal manusia sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lucas berpendapat bahwa pembentukan modal manusia bergantung pada dua mekanisme utama, yaitu pendidikan formal dan proses pembelajaran berbasis pengalaman atau *learning by doing*.²³ Melalui pendidikan, individu memperoleh dasar pengetahuan, sedangkan melalui pengalaman kerja, keterampilan dan produktivitasnya terus berkembang seiring waktu, memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, memperkuat investasi pada sektor sumber daya manusia menjadi langkah kunci yang strategis dalam mengatasi berbagai persoalan sosial-ekonomi, khususnya persoalan kemiskinan. Akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, membuka lebih banyak peluang kerja, serta mempercepat proses mobilitas sosial. Melalui pengembangan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, dan inovatif, investasi pada modal manusia berpotensi memperkecil kesenjangan ekonomi, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, serta secara signifikan menurunkan angka kemiskinan di berbagai lapisan masyarakat.²⁴

2. Teori Maqashid Syariah

Salah satu pilar utama dari sistem hukum Islam adalah Maqasid Syariah, yang bertujuan untuk mengarahkan syariat untuk membantu umat manusia menjadi lebih baik dan melindungi mereka dari segala jenis kerusakan. Konsep ini, menurut Imam Asy-Syatibi, berfokus pada menjaga lima kebutuhan dasar manusia, yang disebut sebagai al-Kulliyat al-Khams. Mereka adalah menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Untuk merealisasikan perlindungan tersebut, maqasid syariah mengelompokkan

²³ R. E Lucas, "On The Mechanics Of Economic Development," *Journal of Monetary Economics* 3 (1988): 42.

²⁴ Shinta Puspasari, "Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja Terdidik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Perspektif Modal Manusia," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 16, no. 2 (2019): 194–209, <https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.500>.

kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer yang sangat mendesak), *hajiyyat* (kebutuhan pendukung yang meringankan kesulitan), dan *tahsiniyat* (kebutuhan penyempurna yang memperindah kehidupan). Pembagian ini menjadi prinsip dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan, terutama dalam mengatur bidang sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam sektor ekonomi, maqasid syariah berperan sebagai panduan moral untuk membentuk sistem yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Berlandaskan prinsip maqasid, aktivitas ekonomi wajib terbebas dari praktik-praktik yang diharamkan seperti riba (bunga yang merugikan), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), karena semua ini bertentangan dengan asas keadilan dan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, model ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan material semata, melainkan juga menekankan pentingnya nilai etika, keseimbangan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kehadiran maqasid syariah dalam ekonomi mengarahkan seluruh aktivitas bisnis dan keuangan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan umum dan menghindari segala bentuk eksploitasi yang merugikan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu wujud konkret dari penerapan maqasid syariah. Upaya ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan akses lapangan kerja yang layak, serta penyediaan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar ini, masyarakat tidak hanya dapat hidup sejahtera secara material, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi spiritual dan intelektualnya. Konsep ini sejalan dengan tujuan maqasid syariah untuk melindungi harta, jiwa, dan akal manusia. Implementasi prinsip ini juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya berorientasi pada pemberdayaan manusia secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar indikator pertumbuhan ekonomi semata.

Dengan demikian, pengentasan kemiskinan harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan maqasid syariah dalam pembangunan ekonomi. Penurunan tingkat kemiskinan merupakan indikator keberhasilan menjaga harta

(kesejahteraan materi), menjaga jiwa (pemenuhan kebutuhan hidup layak), dan menjaga akal (peningkatan kualitas pendidikan). Oleh sebab itu, setiap kebijakan pembangunan, termasuk yang berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan pendapatan per kapita, dan penurunan angka pengangguran, harus selaras dengan prinsip maqasid syariah. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai tujuan utama pembangunan yang holistik dan berkeadilan.²⁵

2.2 Kemiskinan

2.2.1. Definisi Kemiskinan

Secara etimologis, kata "kemiskinan" berasal dari istilah "miskin," yang menggambarkan kondisi seseorang yang tidak memiliki cukup sumber daya material dan hidup dalam keadaan kekurangan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Dalam konteks ini, kemiskinan merujuk pada situasi di mana seseorang berada di bawah ambang batas kebutuhan minimum, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pangan maupun non-pangan.

Ambang batas ini sering disebut sebagai "garis kemiskinan" atau "*poverty line*," yang berfungsi sebagai indikator kritis untuk membedakan antara individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka yang tidak. Dengan demikian, pemahaman tentang kemiskinan tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh individu dalam mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Penentuan garis kemiskinan ini menjadi penting dalam upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sosial untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat.²⁶

Garis kemiskinan (*poverty line*) merujuk pada ambang batas pengeluaran minimum yang diperlukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik yang bersifat konsumsi pangan maupun non-pangan.

²⁵ Erwin Febrian Syuhada and Birusman N, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masyarakat Dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 346–61, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>.

²⁶ Debrina Vita Ferezegia, "Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 4, no. 1 (2018): 1–6, <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan *Cost of Basic Needs* (CBN), yang menghitung garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan konsumsi makanan (dengan standar 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Berdasarkan pendekatan ini, pada bulan September 2024, BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.242 per kapita per bulan, atau sekitar Rp2.803.590 per rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4,71 orang. Angka ini bervariasi antarprovinsi, mencerminkan perbedaan harga dan pola konsumsi setempat.

Sebaliknya, Bank Dunia menggunakan pendekatan *Purchasing Power Parity* (PPP) untuk menentukan garis kemiskinan di tingkat global dan melakukan perbandingan antarnegara. Pendekatan ini membagi garis kemiskinan menjadi tiga kategori: kemiskinan ekstrem dengan ambang batas US\$2,15 per hari, negara berpendapatan menengah bawah dengan batas US\$3,65 per hari, dan negara menengah atas dengan batas US\$6,85 per hari. Angka terakhir ini menggambarkan bahwa sekitar 60,3% penduduk Indonesia, atau sekitar 171,8 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan tersebut. Meskipun terdapat perbedaan signifikan antara pendekatan yang digunakan oleh BPS dan Bank Dunia, keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan, karena dirancang untuk tujuan yang berbeda. Pendekatan BPS lebih relevan untuk konteks Indonesia, sedangkan Bank Dunia menggunakan metodologi komparatif global. BPS juga mengklasifikasikan masyarakat Indonesia berdasarkan kelipatan garis kemiskinan, dengan kategori mulai dari kelompok miskin ($<1 \times \text{GK}$), rentan miskin ($1-1,5 \times \text{GK}$), menuju kelas menengah ($1,5-3,5 \times \text{GK}$), kelas menengah ($3,5-17 \times \text{GK}$), hingga kelas atas ($>17 \times \text{GK}$). Pada September 2024, BPS mencatat bahwa 8,57% penduduk Indonesia tergolong miskin, sementara 24,42% lainnya berada dalam kategori rentan miskin.²⁷

Menurut Supriatna, kemiskinan adalah suatu kondisi keterbatasan yang tidak muncul dari kehendak individu. Seseorang dapat dikategorikan sebagai

²⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia Dan BPS," 2025, <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702>.

miskin jika ia mengalami kekurangan di berbagai aspek, seperti pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum, yang pada akhirnya menciptakan siklus ketidakberdayaan. Dalam perspektif ini, kemiskinan sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal, yang berujung pada rendahnya kapasitas individu dalam berbagai aspek kehidupan.

Keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menghambat peluang mereka untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang kemiskinan harus mencakup analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta upaya untuk memberdayakan individu agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut.²⁸

Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ada berbagai penyebab yang melatarbelakangi kondisi ini, mulai dari keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, hingga minimnya akses terhadap pendidikan yang layak dan kesempatan kerja. Sebagai persoalan global, kemiskinan dipahami secara beragam, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dari masing-masing negara atau wilayah.

Jika ditelusuri dari arti asalnya, kata miskin memiliki makna dasar sebagai "diam" atau "tidak bergerak." Dalam konteks istilah, kemiskinan dapat dimaknai sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ketidakmampuan ini bukan semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan juga karena ketiadaan usaha, dorongan, atau kesempatan

²⁸ Supriatna, *Kemiskinan: Teori, Fakta Dan Kebijakan* (Jakarta: IMPAC, 1997).

untuk bergerak maju. Keadaan ‘diam’ tersebut baik secara fisik, mental, maupun sosial menjadi akar dari keterpurukan ekonomi yang dialami.²⁹

Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan secara materi, tetapi juga sebagai kemandekan dalam semangat dan tindakan untuk keluar dari situasi tersebut. Hal ini sejalan dengan isyarat yang terkandung dalam Surah al-Kahfi ayat 79, yang menggambarkan bagaimana ketiadaan gerak atau perubahan dapat membawa pada kerugian, meskipun secara lahiriah tampak tenang. Ayat tersebut menyiratkan bahwa dalam ketenangan yang tampak, bisa tersembunyi potensi kehancuran jika tidak diiringi dengan kesadaran dan upaya untuk berubah.

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٧٩)

Artinya: Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.

Ayat tersebut mengisahkan tentang perahu yang sengaja dibocorkan sebagai bentuk perlindungan dari ancaman seorang raja zalim, yang dikenal suka merampas perahu-perahu yang masih layak dan baik. Tindakan tersebut, meskipun tampak merugikan pada awalnya, sejatinya memiliki maksud yang mulia yakni menyelamatkan perahu dan pemiliknya dari kezaliman.

Kisah ini memberikan pelajaran penting bahwa tidak semua hal yang tampak buruk selalu berakhir pada keburukan. Dalam kebijaksanaan-Nya, Allah SWT terkadang memberikan ujian yang terasa pahit sebagai jalan untuk menguji kesabaran hamba-Nya dan menumbuhkan prasangka baik (husnudzan) kepada-Nya. Sebab, manusia yang tidak mampu bersabar dalam menghadapi ujian justru akan menjadi golongan yang merugi, karena kehilangan kesempatan untuk memetik hikmah dan rahmat yang tersembunyi di balik setiap cobaan.

²⁹ Syaiful Ilmi, “Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam,” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 67, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.918>.

2.2.2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Para ahli mengklasifikasikan kemiskinan ke dalam beberapa jenis berdasarkan penyebab, pola, dan proses yang terjadi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa pembagian kemiskinan beserta contoh-contohnya:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi ketika seseorang atau suatu keluarga hidup di bawah batas minimum pendapatan yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dalam kondisi ini, individu tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar sehari-hari. Sebagai contoh, sebuah keluarga dengan penghasilan yang sangat rendah hingga tidak mampu menyediakan makanan yang layak atau mendapatkan perawatan kesehatan dasar, termasuk dalam kategori kemiskinan absolut. Situasi semacam ini mencerminkan urgensi perlunya intervensi dan perhatian dari berbagai pihak guna membantu mereka keluar dari kondisi yang sangat rentan dan memprihatinkan.

2. Kemiskinan Subjektif

Kemiskinan subjektif terjadi ketika individu merasa tidak mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun secara objektif mereka mungkin tidak mengalami kekurangan material. Dalam hal ini, kemiskinan dipengaruhi oleh persepsi dan mentalitas seseorang yang merasa hidupnya masih kurang meskipun kebutuhan dasar telah tercukupi.

Contoh: Pengemis musiman yang muncul menjelang hari besar keagamaan, meskipun mereka sebenarnya tidak berada dalam kondisi miskin, tetapi merasa kurang dan terus meminta-minta.

3. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif terjadi karena ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, yang sering kali dipicu oleh kebijakan pembangunan yang tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang tidak merata dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan antara kelompok yang lebih kaya dan kelompok yang lebih

miskin.

Contoh: Tingginya angka pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah.

4. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi di daerah-daerah dengan sumber daya alam yang terbatas atau kurang mendukung produktivitas yang tinggi. Masyarakat yang tinggal di daerah seperti ini cenderung memiliki pendapatan yang rendah meskipun sudah berusaha keras.

Contoh: Masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang hidup di wilayah tandus dan kering, atau di daerah yang sering terkena bencana alam seperti banjir, yang menghambat usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.

5. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural disebabkan oleh budaya dan pola pikir masyarakat yang enggan berusaha keras untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam beberapa komunitas, ada kecenderungan untuk hidup dengan mengandalkan keberuntungan atau sumber daya alam tanpa berupaya mengubah cara hidup mereka untuk mengikuti perkembangan zaman.

Contoh: Masyarakat Suku Kubu di Sumatera, yang sebagian besar hidup dengan mengandalkan hasil alam dan hutan, namun tidak mengubah pola hidup mereka meskipun hutan semakin terbatas.

6. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan struktur sosial dalam menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Masyarakat yang terisolasi atau tidak mendapat akses yang cukup terhadap sumber daya tidak dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan dalam struktur sosial atau kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat tertentu.

Contoh: Suku Kubu (Suku Anak Dalam) yang tidak mampu mengakses kesejahteraan meskipun ada perubahan lahan dari hutan menjadi kebun,

atau masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari perusahaan besar seperti Freeport.³⁰

2.2.3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Hartomo dan Aziz dalam pemaparan Dadan Hudyana yang dikutip oleh Sarul Mardianto, terdapat sejumlah faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kemiskinan dalam masyarakat:

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Kurangnya akses terhadap pendidikan formal maupun nonformal menyebabkan minimnya keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan. Rendahnya tingkat pendidikan membuat individu tidak memiliki daya saing yang memadai di dunia kerja, sehingga menyulitkan mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tetap.

2. Kurangnya Etos Kerja

Sikap tidak aktif, enggan berusaha, atau terlalu mengandalkan nasib menjadi penyebab lain dari kemiskinan. Individu yang tidak memiliki semangat kerja dan motivasi tinggi cenderung tidak mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga mereka terjebak dalam kondisi serba kekurangan.

3. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Dalam beberapa wilayah, kemiskinan disebabkan oleh kondisi geografis dan lingkungan yang miskin akan sumber daya alam. Ketika alam tidak dapat lagi memberikan manfaat ekonomi yang memadai, masyarakat setempat pun kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama jika tidak ada alternatif pemanfaatan sumber daya lainnya.

4. Minimnya Peluang Kerja

Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan di suatu daerah menjadi penghambat utama dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Walaupun idealnya masyarakat bisa menciptakan peluang usaha sendiri, dalam

³⁰ Harun Samsudin; Dimas Sadiman; Irwan Pacrozi, *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit* (Sumatra Selatan: Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, 2019).

kenyataannya hal tersebut sulit dilakukan tanpa keterampilan dan modal yang mencukupi, terutama oleh kelompok ekonomi lemah.

5. Kekurangan Modal Usaha

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah tidak adanya modal awal untuk memulai usaha atau membeli perlengkapan kerja. Tanpa dukungan modal, keterampilan yang dimiliki pun tidak dapat digunakan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan.

6. Besarnya Tanggungan Keluarga

Tingginya jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung menjadi beban tersendiri, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan. Semakin banyak jumlah tanggungan, maka semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga memperbesar risiko jatuh ke dalam kemiskinan apabila pendapatan stagnan atau tidak mencukupi.³¹

Menurut Bank Dunia, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kemiskinan, antara lain:

1. Kegagalan dalam hal kepemilikan, khususnya kepemilikan terhadap lahan dan modal usaha yang menjadi penunjang utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan dasar dan sarana prasarana publik yang mendukung kehidupan layak, seperti air bersih, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
3. Adanya kecenderungan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada wilayah perkotaan dan sektor-sektor tertentu, yang menyebabkan ketimpangan kesempatan di antara masyarakat. Hal ini diperburuk oleh sistem sosial dan ekonomi yang tidak inklusif, perbedaan kapasitas sumber daya manusia, serta ketimpangan antara sektor ekonomi tradisional dan modern. Selain itu, produktivitas yang rendah dan lemahnya pembentukan modal juga menjadi hambatan dalam mengatasi kemiskinan.

³¹ Itang, "Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2015): 1–30.

4. Pola hidup masyarakat yang berhubungan dengan kurangnya kemampuan dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara optimal, yang turut mendorong terjadinya kemiskinan.
5. Tidak adanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif (*good governance*), yang menyebabkan kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan maksimal.
6. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan juga menjadi penyebab utama kemiskinan, karena merusak potensi sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.³²

2.2.4. Dampak Kemiskinan

Muttaqien mengungkapkan bahwa kemiskinan menimbulkan dampak yang hampir serupa di berbagai negara. Kemiskinan tidak hanya menyebabkan hilangnya kesejahteraan dalam aspek dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga berdampak pada berbagai hak fundamental lainnya. Dampak tersebut meliputi hilangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara manusiawi, serta termarginalkannya hak atas perlindungan hukum. Selain itu, kemiskinan juga mengakibatkan hilangnya rasa aman, partisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik, kesejahteraan psikis, serta kebebasan untuk berinovasi dan menjalani kehidupan yang bermartabat.³³

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.3.1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian pembangunan manusia yang dilihat dari aspek-aspek dasar

³² Zuchri Abdussamad, *Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik* (Makassar: Syakir Media Press, 2023).

³³ Arif Muttaqien, *Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan: Rekonstruksi Arah Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Terbebaskan Dan Demokratis* (Jakarta: Khanata Pustaka LP3ES Indonesia, 2006).

kualitas hidup. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, IPM tersusun atas tiga unsur utama, yakni derajat kesehatan, pendidikan, dan kapasitas ekonomi masyarakat. Aspek kesehatan dinilai melalui indikator harapan hidup dan kondisi kesehatan masyarakat. Sementara itu, sektor pendidikan dilihat dari tingkat literasi, partisipasi dalam pendidikan formal, serta rata-rata lama sekolah. Untuk dimensi ekonomi, indikator yang digunakan adalah pengeluaran per kapita yang mencerminkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Sjafi'i dan Hidayanti menyoroti pentingnya keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang kompeten menjadi elemen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terus-menerus. Maka dari itu, peningkatan nilai IPM dipandang sebagai langkah strategis yang harus ditempuh oleh suatu negara demi menciptakan tenaga kerja yang lebih berkualitas sekaligus menopang proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.³⁴

Mankiw mengemukakan bahwa modal manusia mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh individu melalui proses pendidikan, baik sejak masa kanak-kanak maupun melalui pelatihan kerja di usia dewasa. Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat ditempuh melalui investasi dalam sektor pendidikan, karena pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi pekerja dan mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai alat untuk mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Upaya ini pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, jika sebuah negara ingin mencapai kemajuan ekonomi jangka panjang yang stabil, maka peningkatan

³⁴ Ahmad Sjafi'i and Nur Aini Hidayati, "Genjot Anggaran Pendidikan-Rendam Kemiskinan," *Gemari*, 2009, 68–69.

³⁵ N. Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003).

IPM menjadi langkah yang sangat strategis untuk memperkuat kualitas tenaga kerja di negara tersebut.³⁶

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok kemaslahatan yaitu pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam memandang bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasarnya, baik dalam aspek spiritual maupun material, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keadilan ekonomi yang dianjurkan dalam syariat.³⁷

Menurut Rama dan Makhlan, pembangunan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk memungkinkan manusia mempertahankan eksistensinya serta menjalankan peran utamanya sebagai *khalifah* di bumi. Dalam pandangan ini, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai proses peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga sebagai sarana untuk menunaikan tanggung jawab spiritual dan sosial manusia.

Islam memandang manusia sebagai pusat dari pembangunan. Ia berperan sebagai subjek yang menginisiasi dan mengarahkan pembangunan, sekaligus sebagai objek yang merasakan manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri. Konsep ini berakar dari paradigma Islam yang menjadikan manusia sebagai pelaku utama dalam peradaban dan penjaga amanah Tuhan di muka bumi.³⁸

Di sisi lain, Al-Qur'an juga memberikan landasan normatif terkait pengembangan kesejahteraan manusia, sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Baqarah [2]:201:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)

³⁶ Saparuddin Mukhtar, Ari Saptono, and As'ad Samsul Arifin, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Ecoplan: Journal of Economics and Development Studies* 2, no. 2 (2019): 77–89, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.68>.

³⁷ Inayah Swasti Ratih and Tamimah, "Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1689–99.

³⁸ Ali Rama and Makhlan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah," *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013).

Artinya: Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.”

Menurut *Tafsir Al-Mukhtashar*, Surah Al-Baqarah [2]:201 menggambarkan sosok manusia beriman yang memiliki keyakinan teguh kepada Allah dan Hari Akhir. Ia memanjatkan doa kepada Rabb-nya agar diberikan kebaikan hidup di dunia baik berupa nikmat lahiriah maupun kesempatan untuk beramal saleh dan pada saat yang sama, memohon agar dianugerahi kebaikan di akhirat berupa surga serta dilindungi dari siksa neraka.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep kebaikan dalam Islam bersifat menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Kebaikan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik moral, spiritual, material, sosial, maupun ekonomi. Seluruh aspek ini saling berkaitan dan bersama-sama membentuk landasan bagi tercapainya pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan dalam perspektif Islam.

Salah satu indikator pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pada dasarnya bergantung pada prinsip pemenuhan kebutuhan menurut kerangka Maqāṣid Syarī‘ah. Maqāṣid Syarī‘ah sendiri adalah tujuan utama hukum Islam untuk mencapai dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah salah satu tujuan ini. Oleh karena itu, seorang *mujtahid* perlu memahami dan mempertimbangkan maqāṣid dalam proses ijtihadnya, guna merumuskan hukum yang relevan dan aplikatif terhadap berbagai persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Hadis.

2.3.2. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Untuk menilai kualitas pembangunan manusia, Program Pembangunan Dunia (UNDP) membuat instrumen kuantitatif yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI). Meskipun dibuat sebagai ukuran yang konsisten dan sistematis, UNDP menyadari bahwa

alat ini tidak dapat mewakili secara menyeluruh semua aspek pembangunan manusia.

Menurut *Human Development Report* tahun 1993, UNDP menetapkan tiga dimensi utama dalam pengukuran IPM, yaitu:

1. Lama Hidup (*Longevity*), yang diukur menggunakan indikator harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*) serta tingkat kematian bayi per seribu kelahiran hidup (*infant mortality rate*).
2. Prestasi Pendidikan (*Educational Achievement*), yang dievaluasi melalui dua indikator utama, yaitu tingkat melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (*mean years of schooling*).
3. Akses terhadap Sumber Daya (*Access to Resources*), yang secara makro diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita dengan pendekatan *purchasing power parity* (PPP) dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dan dapat dilengkapi dengan data tingkat partisipasi angkatan kerja.

Dari ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat IPM mencakup:

1. Tingkat Kesehatan dan Usia Harapan Hidup, yang tercermin dari angka harapan hidup sebagai indikator utama dalam menilai kualitas kesehatan serta umur panjang penduduk.
2. Pendidikan, yang dianalisis melalui indikator tingkat melek huruf dan rata-rata lama pendidikan, mencerminkan individu yang terdidik, inovatif, memiliki keterampilan, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual.
3. Pendapatan, yang dilihat melalui daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), berfungsi untuk mengukur tingkat kemandirian individu serta kemampuan mereka dalam mengakses kehidupan yang layak.³⁹

³⁹ Endang Yektiningsih, "Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018," *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 18, no. 2 (2018): 32–50, <https://doi.org/10.30742/jisa1822018528>.

2.4 Pendapatan Per Kapita

2.4.1 Definisi Pendapatan Per Kapita

Menurut Tarigan, pendapatan per kapita dihitung dengan cara membagi total pendapatan suatu wilayah dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Secara teori, angka ini dapat diperoleh dengan mengalikan total pendapatan daerah dengan jumlah penduduk. Namun, karena data tersebut sering kali tidak tersedia, umumnya perhitungan dilakukan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Tergantung pada tujuan analisis, pendapatan per kapita bisa dihitung dengan harga berlaku atau harga konstan.⁴⁰

Selanjutnya, Jhingan menjelaskan bahwa PDRB per kapita dapat dihitung dengan dua cara: harga berlaku atau harga konstan. Pendapatan per kapita adalah hasil pembagian antara pendapatan regional berdasarkan harga konstan (ADHK) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.⁴¹

Sementara itu, menurut Sukirno, pendapatan per kapita diartikan sebagai rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap warga negara dalam kurun waktu satu tahun. Nilai ini dihitung dengan cara membagi total pendapatan nasional suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduknya pada periode yang sama.⁴²

Salah satu alat penting untuk mengukur keadaan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga konstan adalah dua cara yang berbeda untuk menghitungnya. PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dengan memperhitungkan harga setiap tahun. Sebaliknya, PDRB berdasarkan harga konstan lebih akurat dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan efek inflasi.

⁴⁰ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional-Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

⁴¹ ML. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan. Teori Dan Kebijakan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2007).

⁴² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat, PDRB per kapita berfungsi sebagai ukuran pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk setiap tahun. Dengan menghitung PDRB per kapita, kita dapat mengetahui seberapa besar manfaat dari berbagai aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, memahami PDRB dan pendapatan per kapita sangat penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini karena pendekatan pendapatan dalam perhitungan PDRB mencakup semua balas jasa faktor produksi, seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang distribusi pendapatan di wilayah tersebut.⁴³

Dalam perspektif Islam, pendapatan dipandang sebagai bentuk kompensasi yang sah atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Pemberian imbalan atas usaha yang halal merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam syariat Islam, selama tidak berasal dari sumber yang haram atau merugikan pihak lain. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga meraih pendapatan yang layak dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan hidup yang utuh dan berkah.

Syariat Islam mengarahkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan halal. Artinya, seseorang didorong untuk memperoleh pendapatan dari sumber-sumber yang dibenarkan secara syar'i guna menjamin kehidupan yang layak, baik dari aspek fisik maupun spiritual.⁴⁴

Namun demikian, dalam pandangan Islam, tingginya pendapatan per kapita bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan yang hakiki. Islam tidak memusatkan perhatian semata pada aspek material, melainkan menempatkan pendapatan sebagai unsur pelengkap dalam upaya meraih tujuan yang lebih tinggi.

⁴³ Khairul Amri, "Infrastruktur Transportasi Dan Kepadatan Penduduk Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2014): 438–50.

⁴⁴ Mahfud, "Kompensasi Dan Evaluasi Kinerja Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam," *Madani Syari'ah* 2, no. 1 (2019): 45–64.

Dengan kata lain, pendapatan per kapita tinggi merupakan faktor yang penting, tetapi bukan tujuan akhir dari kesejahteraan menurut Islam.

Islam menggunakan konsep *falah* sebagai ukuran kesejahteraan sejati, yakni keberhasilan hidup yang mencakup dimensi spiritual dan materiil. *Falah* mencerminkan kondisi ideal di mana seorang individu tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga memiliki ketenangan jiwa, keimanan yang kuat, dan orientasi hidup yang terarah kepada keridhaan Allah SWT.

2.5 Pengangguran

2.5.1 Definisi Pengangguran

Menurut Menurut Suroto, dalam ekonomi makro, pengangguran merujuk pada bagian angkatan kerja yang tidak bekerja. Dalam konteks mikro, pengangguran terjadi ketika seseorang yang memiliki keterampilan dan keinginan untuk bekerja, namun belum memiliki pekerjaan.⁴⁵ Nanga berpendapat bahwa pengangguran berdampak pada hilangnya output ekonomi serta menimbulkan penderitaan bagi individu yang tidak bekerja, dan juga dianggap sebagai pemborosan sumber daya ekonomi.⁴⁶ Rahardja menambahkan bahwa seseorang tidak dapat dianggap pengangguran hanya karena tidak bekerja, karena apabila ia aktif mencari pekerjaan, kemungkinan besar ia akan segera mendapatkannya. Dalam definisi ekonomi, pengangguran berbeda dengan ketidakinginan untuk bekerja, sebab seseorang hanya dianggap menganggur apabila ia tengah mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya.⁴⁷

Soeroto membedakan antara "penganggur" dan "pengangguran". Penganggur adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Sedangkan pengangguran

⁴⁵ Soeroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).

⁴⁶ Muana Nanga, *Makro Ekonomi Teori Masalah Dan Kebijakan*, Edisi perd (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

⁴⁷ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001).

mengacu pada keadaan seseorang yang sedang menganggur, berbeda dengan orang yang tidak bekerja atau tidak ingin bekerja.⁴⁸

Mankiw et al. mendefinisikan penganggur sebagai individu yang tidak bekerja tetapi ingin memperoleh pekerjaan. Mereka termasuk dalam kelompok yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa sulit mendapatkannya. Selain itu, mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja juga dianggap penganggur. Dalam konteks ekonomi, seseorang dianggap bekerja jika dalam minggu sebelumnya ia melakukan pekerjaan yang dibayar. Sebaliknya, seseorang dianggap menganggur jika sementara berhenti bekerja atau sedang mencari pekerjaan.⁴⁹

Dalam perspektif Islam, fenomena pengangguran tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral. Dalam bahasa Arab, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah *farāgh*, yang berarti kekosongan atau tidak adanya aktivitas yang produktif. Pengangguran mengacu pada situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan sama sekali untuk mencukupi kebutuhan pokok hariannya.

Kondisi ini, jika berlangsung dalam waktu yang lama dan tanpa adanya alternatif pendapatan, dalam pandangan Islam dapat menjadikan seseorang masuk ke dalam kategori *fakīr* atau *miskīn*. Kedua golongan ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam fikih zakat, termasuk pihak yang berhak menerima bantuan sosial, baik berupa sedekah maupun zakat. Dengan demikian, Islam menaruh perhatian besar terhadap kondisi pengangguran dan mengupayakan adanya sistem solidaritas sosial melalui instrumen-instrumen ekonomi Islam, agar kebutuhan dasar setiap individu tetap terpenuhi dan tidak ada yang terpinggirkan dari kehidupan yang layak.⁵⁰

⁴⁸ Soeroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*.

⁴⁹ N. Gregory Mankiw, Euston Quah dan Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

⁵⁰ Moh. Subhan, "Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018): 22–33, <https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.48>.

2.5.2 Macam-Macam Pengangguran

Pengangguran dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi Subri. Beberapa jenis pengangguran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*): Merujuk pada individu yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan.
2. Setengah Menganggur (*Undereployment*): Terjadi ketika ada perbedaan antara jumlah pekerjaan yang sebenarnya dilakukan seseorang dengan pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan sesuai kemampuan dan keinginannya.
3. Setengah Menganggur yang Kentara (*Visible Undereployment*): Seseorang yang bekerja paruh waktu secara tidak sukarela, atau bekerja lebih sedikit dibandingkan dengan waktu kerja yang seharusnya.
4. Setengah Menganggur yang Tidak Kentara (*Invisible Undereployment*): Seseorang yang bekerja penuh waktu, namun pekerjaannya dianggap tidak memadai karena gaji yang rendah atau pekerjaan tersebut tidak memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan.
5. Pengangguran Tidak Kentara (*Disguised Unemployment*): Meskipun individu tersebut termasuk dalam angkatan kerja, mereka sebenarnya menganggur jika dilihat dari segi produktivitas kerja.
6. Pengangguran Friksional: Terjadi ketika seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Selama proses peralihan ini, individu tersebut berada dalam status pengangguran sementara sebelum mendapatkan pekerjaan baru.
7. Pengangguran Struktural: Disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, baik itu dari segi bidang keahlian, keterampilan, atau lokasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tahap awal dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan hipotesis, dan menguji validitas instrumen penelitian. Penelitian ini bersifat *eksploratif*, dengan skala kecil, waktu singkat, dan biaya rendah. Tujuannya adalah mengumpulkan data awal untuk memahami fenomena yang diteliti, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan akurasi penelitian. Hasil penelitian terdahulu menjadi dasar untuk merancang penelitian utama yang lebih komprehensif dan sistematis. Dengan demikian, penelitian terdahulu memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan penelitian. Berikut merupakan Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, 2018, Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran	Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran	Kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dengan pendekatan data panel.	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien jalur sebesar -	Variabel pertumbuhan ekonomi, Obyek penelitian (Indonesia). ⁵¹

⁵¹ Prasetyoningrum, *Analisis ...*, h. 236

	Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Kajian Mengenai Dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia.			0,71. Artinya, peningkatan IPM cenderung menurunkan angka kemiskinan. Di sisi lain, variabel pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,23. Selain itu, pengangguran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien jalur 0,14 dan nilai probabilitas 0,0035. Hasil	
--	--	--	--	---	--

				lainnya mengindikasikan bahwa variabel pengangguran mampu menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara IPM dan kemiskinan, serta dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.	
2	Sindi Rahayu Sipahutar & Adanan Murroh Nasution, 2023, Pengaruh IPM, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk	IPM, PDRB Per kapita dan Jumlah Pengangguran	Kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan pendekatan data panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. PDRB per kapita secara parsial berpengaruh	Variabel PDRB per kapita, Obyek penelitian (Sumatera Utara). ⁵²

⁵² Sipahutar and Nasution, *Pengaruh...*, h. 659

	Miskin Provinsi Sumatera Utara”.			terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah pengangguran secara parsial berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita dan jumlah pengangguran secara simultan berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.	
3	Lisda Aisyah, Mona Kharida Syafa dan Ghina Rabban. 2023,	IPM dan Tingkat Pengangguran	Kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi	IPM (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap	Variabel pendapatan per kapita, Obyek penelitian (Indonesia),

	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2012-2022.		linear berganda.	Kemiskinan (Y) di Indonesia tahun 2012-2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia tahun 2012-2022. Secara simultan antara variabel bebas yaitu IPM (X_1) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia tahun 2012-2022.	tahun 2012-2022. ⁵³
4	Murbanto Sinaga, Sri Winda	Pendidikan, Pendapatan per	Kuantitatif dengan metode	Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan	Variabel pendidikan, Obyek penelitian

⁵³ Lisda Aisyah, Mona Khairida Syafa, and Ghina Rabban, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2012-2022," *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandungan* 1, no. 1 (2023): 27–39, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

	Hardiyanti Damanik, Rika Surianto Zalukhu , Rapat Piter Sony Hutauruk, dan Daniel Collyn. 2023, Pengaruh Pendidikan, Pendapatan perkapita dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kepulauan Nias.	kapita dan penganggu ran	analisis regresi data panel dengan pendekatan <i>Random Effects Model</i> (REM).	berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias. Selanjutnya, pendapatan per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias. Pengujian simultan menunjukkan bahwa pendidikan, pendapatan per kapita dan pengangguran	(Kepulauan Nias). ⁵⁴
--	--	--------------------------------	--	---	------------------------------------

⁵⁴ Sinaga et al., *Pengaruh...*, h.140.

				secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias	
5	Ria Kusumaningrum, Umi Kulsum, Marsha Siti Aisyah Hafsari, dan Della Rizki Ananda, 2023, Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan	Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja modal, dan Tingkat pengangguran terbuka	Kuantitatif dengan menggunakan model regresi berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM dan belanja modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Sementara itu Pertumbuhan Ekonomi (GDP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap	Variabel pertumbuhan ekonomi, belanja modal, Obyek penelitian (Jawa Timur), tahun 2002-2021. ⁵⁵

⁵⁵ Ria Kusumaningrum et al., "Perspektif Ekonomi Dan Bisnis Islam Mengenai Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2021," *Sahid Business Journal* 2, no. 02 (2023): 63–76, <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v2i02.95>.

	Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2021.			Kemiskinan di Jawa Timur.	
6	Muhamad Azis Maulana & Aan Julia, 2022, Pengaruh Indeks Pendidikan, Gini Rasio, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Enam Provinsi Indonesia Tahun 2015-2019”.	Indeks Pendidikan, Gini rasio, Jumlah penduduk dan Pendapatan per kapita	Kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model fixed effect.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel gini rasio secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk memiliki hubungan secara parsial negatif signifikan dengan tingkat kemiskinan, dan pendapatan per kapita tidak	Variabel indeks Pendidikan, gini rasio, jumlah penduduk, Obyek penelitian (enam provinsi di Indonesia (Aceh, Bengkulu, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku). ⁵⁶

⁵⁶ Maulana and Julia, *Pengaruh...*, h.17.

				mempengaruhi tingkat kemiskinan; keduanya dipengaruhi oleh variabel indeks pendidikan dengan probabilitas alfa 20%.	
7	Muhammad Miftahussalam & Mohammad Rofiuddin, 2021, Pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”.	PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan Zakat	Kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel dengan model fixed effect model.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Zakat, PDRB Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. PDRB tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. Sedangkan	Variabel PDRB, zakat, Obyek penelitian (Jawa Tengah). ⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Miftahussalam and Mohammad Rofiuddin, “Pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia Dan Zakat Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah,” *Journal of Economics Research and Policy Studies* 1, no. 1 (2021): 40–54, <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i1.63>.

				Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat menurunkan Kemiskinan di Jawa Tengah. Model penelitian memperjelas peran zakat dan pembangunan manusia dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga penting untuk mempertahankan dan meningkatkan nilainya dari waktu ke waktu untuk mengurangi kemiskinan.	
8	Laura Nindya asmanata, Emi Yulia Siska, dan Abdullah Sahroni, 2022,	Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan	Kuantitatif dengan menggunakan data panel.	Berdasarkan hasil analisis dan diskusi penelitian, hasilnya sebagai berikut: 1)	Variabel pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan,

	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2020”.	dan Penganggu ran		Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2020. 2) Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2020. 3) Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun	Obyek penelitian (Sumatera Selatan) tahun 2017-2020. ⁵⁸
--	--	-------------------------	--	---	---

⁵⁸ Laura Nindya Asmananta, Emi Yulia Siska, and Abdullah Sahroni, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2020,” *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2022): 114, <https://doi.org/10.30829/hf.v9i2.12820>.

				2017-2020. 4) Pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2020 secara simultan	
9	Andris Imania Oktavian, Fivien Muslihatinningsih dan Endah Kurnia Lestari. 2023, Pengaruh IPM, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap	IPM, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi	Kuantitatif analisis regresi data panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memengaruhi kemiskinan secara signifikan, pertumbuhan ekonomi memengaruhi kemiskinan secara signifikan, dan pengangguran memengaruhi	Variabel pertumbuhan ekonomi, Obyek penelitian (Jawa Timur) tahun 2017-2021. ⁵⁹

⁵⁹ Oktavian et al., *Pengaruh...*, h.28.

	Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2017-2021”.			kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tetapi tidak signifikan	
10	Nurul Fadlillah, Sukiman dan Agustin Susyatna Dewi, 2016, Analisis pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, IPM dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009-2013”.	Pendapatan per kapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Penduduk	Penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey.	Berdasarkan hasil penelitian pendapatan per kapita menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, indeks pembangunan manusia	Variabel pertumbuhan penduduk, Obyek penelitian (Jawa Tengah) tahun 2009-2013, menggunakan metode survey. ⁶⁰

⁶⁰ Nurul. Fadlillah, Sukiman and Agustin Susyatna Dewi, “Analisi Pengaruh Pendapatan per Kapita, Tingkat Penaguran, IPM Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* 11, no. 01 (2016): 18–26.

				berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dan pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Dari ketiga variabel tersebut, yang mempunyai koefisien signifikan terhadap pendapatan per kapita adalah pendapatan per kapita, sehingga pendapatan per kapita paling elastis terhadap penduduk miskin	
11	Indah,	Tingkat	Metode	Hasil menunjukan	Pendapatan Per

	Purboningtyas, Indah Retno Sari, Tian Guretno, Ari Dirgantara, Dwi Agustina dan M Al Haris, 2020, Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.	Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia	Regresi Linear Berganda	tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019, Indeks pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat	Kapita, Obyek Penelitian (Jawa Tengah). ⁶¹
--	--	---	-------------------------	---	---

⁶¹ Indah Purboningtyas et al., "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Analysis of The Influence of Open Unemployment Levels and Human Development Index on Poverty in Central Java Province," *Jurnal Sains Dan Matematika Unpam* 3, no. 1 (2020): 81–88, <https://core.ac.uk/download/pdf/337609876.pdf>.

				kemiskinan tahun 2010-2019.	
12	Yunie Rahayu, 2018, Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi	Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita, dan Jumlah Pengangguran	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2013-2016, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2013-2016, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk	PDRB Per Kapita, Obyek Penelitian (Jawa Timur). ⁶²

⁶² Yunie Rahayu, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi," *EKONOMIS : Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 165, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.40>.

				miskin tahun 2013-2016.	
13	Aulia Nur Azizah dan Binti Nur Aisyah, 2022, Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur	Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengangguran	Kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. (3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di	Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Obyek Penelitian (Jawa Timur). ⁶³

⁶³ Aulia Nur Azizah and Binti Nur Asiyah, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2697–2718, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>.

				Jawa Timur. (4) pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur.	
14	Ida Syafa'atur Rohmah dan Jalu Aji Prakoso, 2022, Pengaruh IPM, RLS, TPT, dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat.	IPM, RLS, TPT, dan Pengeluaran Perkapita	Metode model random effect yang dipilih dari tiga metode pengolahan data panel melalui pengujian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran per kapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap variasi naik/turunnya kemiskinan. Secara simultan, variabel IPM, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka dan	RLS (rata-rata lama sekolah), Pengeluaran Per kapita, Obyek Penelitian (Provinsi Jawa Barat). ⁶⁴

⁶⁴ Rohmad and Prakoso, *Pengaruh...*, h. 255.

				pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial, variabel IPM dan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	
15	Deljansen Yohanes Thesia dan Ni Luh Karmini,	Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan UMKM,	Jenis data yang digunakan adalah data	Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa: 1)	Pertumbuhan UMKM, Obyek Penelitian (Provinsi Bali). ⁶⁵

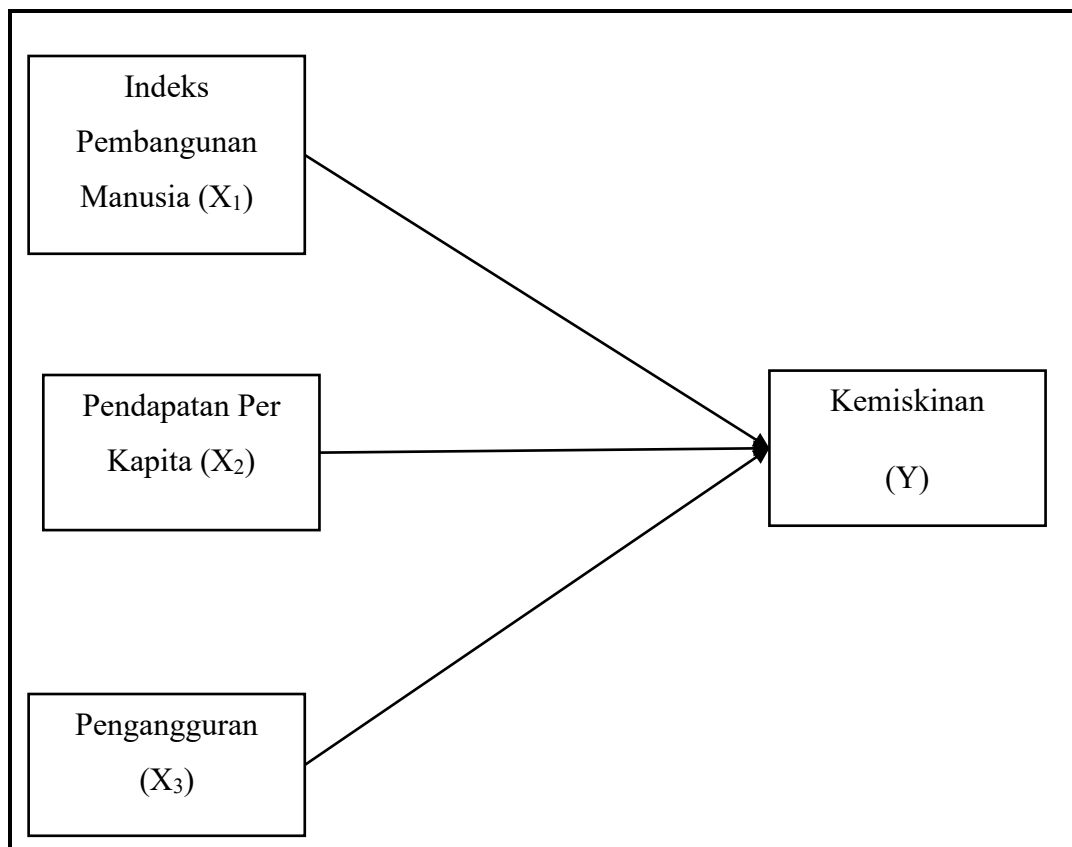
⁶⁵ Deljansen Yohanes Thesia and Ni Luh Karmini, "Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali,"

	2022, Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Pengangguraa n Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali.	dan Tingkat Penganggu ran.	kuantitatif dan kualitatif. Data diolah dengan teknik analisis regresi linear berganda	Pendapatan perkapita, Pertumbuhan UMKM dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Ba li; 2) Pendapatan per kapita dan Pertumbuhan UMKM secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dan Tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat	
--	---	-------------------------------------	---	---	--

				kemiskinan di Provinsi Bali.	
--	--	--	--	---------------------------------	--

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan uji variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Per kapita, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan. Adapun variabel dalam peneelitan ini ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri Indeks Pembangunan Manusia (X_1), pendapatan per kapita (X_2), dan pengangguran (X_3). Variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan (Y). Berikut merupakan Gambar 2.1 Variabel dependen dan variabel independen.



Gambar 2.1 Variabel dependen dan variabel independen

2.8 Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati

Indeks Pembangunan manusia (IPM) berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan dimana ketika IPM meningkat maka tingkat kemiskinan menurun. Kenaikan IPM menunjukkan adanya kemajuan di berbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Ketika IPM mengalami peningkatan, masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang layak, serta peluang kerja yang lebih baik, hal ini akan membantu dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena masyarakat memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.⁶⁶

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, indeks pembangunan manusia memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.⁶⁷ Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Miftahussalam dan Mohammad Rofiudin, ditemukan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.⁶⁸

Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah

H1 : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati.

2.8.2. Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati

⁶⁶ Indah Febriani Sagala et al., “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda,” *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengelatan Alam* 2, no. 2 (2024): 309–24, <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i2.3524>.

⁶⁷ Prasetyoningrum, *Analisis ...*, h.236.

⁶⁸ Miftahussalam, *Pengaruh ...*, h. 52.

Pendapatan per kapita memiliki kaitan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan, di mana kenaikan pendapatan per kapita pada umumnya akan berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Hal ini karena pendapatan per kapita dianggap sebagai indikator kunci dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Ketika pendapatan rata-rata meningkat, daya beli individu maupun rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan juga akan ikut meningkat. Pemenuhan kebutuhan dasar ini mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, sehingga jumlah orang miskin pun dapat ditekan secara signifikan. Sebaliknya, rendahnya pendapatan per kapita membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar tersebut, yang pada akhirnya mendorong kenaikan tingkat kemiskinan.⁶⁹

Menurut penelitian Murbanto Sinaga et al. menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.⁷⁰ Selaras dengan penelitian Nurul Fadlillah, Sukiman dan Agustin Susyatna Dewi, yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.⁷¹

Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah

H2 : Pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati.

2.8.3. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati

Kemiskinan dan pengangguran sangat berhubungan erat. Tingginya angka pengangguran berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, karena berkurangnya pendapatan akibat ketiadaan pekerjaan dapat menurunkan tingkat kemakmuran yang sudah dicapai. Tingginya jumlah pengangguran di

⁶⁹ Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kese (Jakarta: Erlangga, 2012).

⁷⁰ Sinaga, *Pengaruh ...*, h.148.

⁷¹ Fadlillah, *Analisis ...*, h.23.

suatu wilayah dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Karena minimnya penyerapan tenaga kerja, sementara jumlah tenaga kerja baru terus bertambah setiap tahunnya sehingga pengangguran menjadi masalah yang serius.⁷²

Menurut penelitian Sindi Rahayu Sipahutar dan Adanan Murroh Nasution, meunjukkan bahwa jumlah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan.⁷³ Selaras dengan penelitian Laura Nindya Asmanata, Emi Yulia Siska dan Abdullah Sahroni, yang menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.⁷⁴

Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian adalah

H3 : Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati.

⁷² Sukirno, *Ekonomi ...*, h.87.

⁷³ Siputahar, *Pengaruh ...*, h.643.

⁷⁴ Asmanata, *Pengaruh ...*, 123.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono, pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada prinsip positivisme, yang bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, dan data diperoleh melalui penggunaan instrumen penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik guna memperoleh kesimpulan yang bersifat objektif.⁷⁵

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, termasuk orang, benda, atau apapun yang dapat diperoleh dan atau memberikan informasi (data) penelitian. Penelitian ini mengambil populasi dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2015 hingga 2023, yang mencakup Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, dan Jepara. Populasi ini terkait dengan indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, pengangguran, dan kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari total objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Proses pengambilan sampel dalam penelitian menerapkan metode tertentu agar sampel dapat seakurat mungkin mencerminkan populasi. Sampel diperlukan ketika populasi yang diteliti sangat besar dan peneliti tidak dapat mempelajari seluruh populasi. Keputusan dalam pengambilan sampel sering kali dipengaruhi oleh batasan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia untuk peneliti. Elemen yang harus diperhatikan saat mengambil sampel adalah penentuan tujuan penelitian dan pembatasan populasi. Penelitian pada populasi harus dibatasi agar kesimpulan yang diambil dari pengambilan sampel dapat merepresentasikan populasi dengan baik. Kualitas penelitian tidak diukur dari

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

ukuran populasi, melainkan bagaimana peneliti menyampaikan sasaran penelitiannya.⁷⁶

Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah metode pemilihan di mana seluruh anggota populasi diikutsertakan sebagai sampel. Berdasarkan pendekatan ini, jumlah sampel (n) yang digunakan mencakup data time series setiap tahun selama periode 2015 hingga 2023, dengan menggunakan data panel. Dalam penelitian ini, variabel yang dijadikan sampel meliputi Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan kemiskinan selama periode 2015-2023.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan
1	Kemiskinan (Y)	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun nonmakanan. ⁷⁷	Persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk	Persen (%)
2	Indeks Pembangunan Manusia (X1)	Ukuran komposit yang mencerminkan capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat,	Harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita	Persen (%)

⁷⁶ Ibid hlm.7.

⁷⁷ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

		pengetahuan, dan standar hidup layak. ⁷⁸		
3	Pendapatan per Kapita (X2)	Nilai rata-rata output barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. ⁷⁹	Total PDRB dibagi jumlah penduduk	Ribu Rupiah
4	Pengangguran (X3)	Persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan namun sedang aktif mencari kerja. ⁸⁰	Jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja	Persen (%)

3.3.1. Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat atau Dependen (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah tingkat kemiskinan di eks Karesiden Pati. Jenis data data berupa data tahunan kurun waktu 2015-2023 dalam satuan persen. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

2. Variabel Bebas atau Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan sebagai variabel bebas adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (X₁)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu masyarakat dalam mencapai

⁷⁸ Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2006).

⁷⁹ Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketu (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁸⁰ Simanjutak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: LPEM FE UI, 2005).

kehidupan yang layak, dengan berfokus pada tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak. IPM mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan, akses pendidikan, serta kesejahteraan secara umum. Dalam penelitian ini, data IPM yang digunakan berasal dari wilayah eks Karesidenan Pati selama periode 2015 hingga 2023, dan dinyatakan dalam bentuk persentase yang diperoleh dari publikasi resmi BPS Provinsi Jawa Tengah.

b. Pendapatan Per Kapita (X_2)

Pendapatan per kapita berfungsi sebagai salah satu indikator kunci dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Perhitungan nilai ini dilakukan dengan membagi total pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah tersebut dengan jumlah penduduk yang tinggal di sana. Dengan demikian, pendapatan per kapita memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah.⁸¹ Dalam penelitian ini, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk periode tahun 2015-2023 di wilayah eks Karesidenan Pati, yang dinyatakan dalam satuan ribu rupiah.

c. Pengangguran

Pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, namun sedang secara aktif mencari peluang kerja atau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.⁸² Penelitian ini menggunakan data tingkat pengangguran terbuka selama periode 2015 hingga 2023 di wilayah eks Karesidenan Pati yang dinyatakan dalam satuan persen.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan fakta yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi dan tidak resmi, seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar,

⁸¹ Heldiana Ingrida Felisia Fatri and Suryanto, "Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Melalui Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Intervening di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2022," *Soetomo Management Review* 3, no. 1 (2025): 1–13.

⁸² Nanga, *Makro Ekonomi Teori Masalah Dan Kebijakan*.

situs web, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2015 hingga 2023 sebagai sumber data utama. Selain itu, referensi tambahan dikumpulkan dari buku-buku akademik dan hasil penelusuran internet yang mendukung topik penelitian ini

3.5 Metode Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut guna memperoleh kesimpulan di akhir penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel, mengingat wilayah Eks Karesidenan Pati mencakup enam kabupaten, yaitu Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, dan Jepara.

3.5.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan menyajikan data yang diperoleh sesuai kenyataannya, tanpa melakukan penarikan kesimpulan. Selain itu, statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran dari suatu kumpulan data melalui ukuran seperti rata-rata, total, nilai terendah, dan nilai tertinggi.

3.5.2. Estimasi Model Regresi Linear Berganda Data Panel

Dalam melakukan estimasi model regresi berbasis data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Model *Common Effect Model* (CEM) merupakan salah satu pendekatan dalam analisis data panel yang menggabungkan data deret waktu (time series) dan data lintas individu (cross section). Dalam model ini, tidak terdapat perbedaan perilaku antara unit individu maupun antar waktu, sehingga diasumsikan bahwa karakteristik setiap entitas, seperti perusahaan, bersifat homogen sepanjang periode observasi.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan metode estimasi data panel yang memanfaatkan variabel dummy untuk mengidentifikasi perbedaan nilai intersep antar individu atau entitas. Model ini berasumsi bahwa koefisien regresi tetap atau konstan, namun memungkinkan adanya

perbedaan karakteristik individu yang tidak terobservasi dan tetap sepanjang waktu.

3. *Random Effect Model (REM)*

Model *Random Effect Model* (REM) adalah pendekatan dalam analisis data panel yang mengasumsikan adanya korelasi antara gangguan (*error terms*) baik antar waktu maupun antar individu. Dalam model ini, variasi nilai intersep antar entitas dimasukkan ke dalam komponen error masing-masing unit. Keunggulan REM terletak pada kemampuannya mengatasi masalah heteroskedastisitas. Model ini juga dikenal dengan istilah *Generalized Least Square* (GLS).

3.5.3 Penentuan Model

Terdapat Dalam analisis data panel, terdapat tiga jenis model yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Pemilihan model yang paling sesuai dilakukan dengan membandingkan masing-masing model, dan hasil perbandingan inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam analisis lebih lanjut.

a. Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk mengevaluasi apakah model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih layak digunakan dibandingkan dengan model *Common Effect Model* (CEM). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi perbedaan nilai intersep antar entitas, yang tidak dipertimbangkan dalam model CEM namun diperhitungkan dalam model FEM. Dengan kata lain, Uji Chow menguji apakah perbedaan karakteristik individu secara statistik signifikan dan perlu dimasukkan ke dalam model.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan sebagai alat untuk memilih model yang paling sesuai antara *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* dalam analisis data panel. Pengujian ini didasarkan pada nilai p-value; jika p-value kurang dari 5%, maka model FEM lebih sesuai karena terdapat perbedaan signifikan antara efek individual dan variabel independen. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 5%, maka model REM lebih tepat

digunakan karena tidak terdapat korelasi signifikan antara efek individual dan variabel independen.

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan apakah model *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model *Common Effect Model* (CEM). Jika nilai probabilitas (p-value) yang diperoleh kurang dari 0,05, maka REM dianggap lebih sesuai karena adanya varians individual yang signifikan. Namun, jika p-value lebih dari 0,05, maka model CEM dianggap cukup karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar entitas.

3.5.4 Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda, yaitu teknik regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Tujuan dari regresi linier berganda adalah untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Model ini memungkinkan para peneliti untuk mengevaluasi pengaruh kolektif maupun parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel yang menjadi fokus penelitian. Alat EViews 13 digunakan untuk melakukan analisis regresi linier berganda dan kemudian dituangkan ke dalam persamaan regresi untuk penelitian ini.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, tiga variabel independent dan satu variabel dependen. Ketiga variabel independent tersebut yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X_1), Pendapatan per Kapita (X_2), Pengangguran (X_3), dan satu variabel dependen yaitu Kemiskinan (Y). Model penelitian ini yang akan dianalisis diformulasikan hubungan dengan fungsi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan

a = Konstanta (intercept)

b_1 = Koefisien regresi variabel IPM (X_1)

b_2 = Koefisien regresi variabel pendapatan per kapita (X_2)

b_3 = Koefisien regresi variabel pengangguran (X_3)

X_1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X_2 = Pendapatan per kapita

X_3 = Pengangguran

e = Error term (residual)

3.5.5 Uji Asumsi Klasik

Untuk menjawab hipotesis penelitian dapat dikatakan layak untuk dianalisis, maka dalam menganalisis data menggunakan uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik, maka harus dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedestisitas untuk mengetahui kelayakan suatu data supaya dapat dianalisis lebih lanjut.

3.5.5.1. Uji Normalitas

Pengujian ini menentukan apakah nilai residual terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal.⁸³ Selain itu, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual atau galat pada model regresi memiliki distribusi yang bersifat normal, guna memastikan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang dapat memengaruhi validitas model. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidaknya dalam aplikasi *Eviews 13*.

3.5.5.2. Uji Multikolinearitas

Kondisi di mana ada hubungan linear yang kuat, baik sempurna maupun hampir sempurna, antar variabel independen dalam suatu model regresi dikenal sebagai multikolinearitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa beberapa atau semua variabel independen saling berkorelasi secara linear, yang dapat berdampak pada keakuratan estimasi koefisien regresi. Nilai faktor variasi inflasi (VIF) dan toleransi digunakan untuk mengetahui apakah ada multikolinearitas. Model regresi dapat dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1.

⁸³ Gun Mardiatmoko, "Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda," *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan* 14, no. 3 (2020): 333–42, <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>.

3.5.6 Uji Hipotesis

3.5.6.1. Uji Determinasi (R Square)

Untuk mengetahui sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen, digunakan uji determinasi, juga dikenal sebagai R-Square (R^2). Selain itu, uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sesuai garis regresi yang dibuat dengan data yang digunakan dalam penelitian. Nilai R^2 yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 lebih kecil dari 0, maka variabel independen hanya memberikan penjelasan yang sangat sederhana tentang variabel dependen.

3.5.6.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dipengaruhi oleh semua variabel independen dalam model regresi secara bersamaan. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah pengaruh kolektif dari variabel independen terhadap variabel terikat adalah signifikan. Uji F menggunakan hipotesis berikut:

1. Nilai probabilitas (p-value) kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.

3.5.6.3. Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diukur dengan uji t. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan apakah setiap variabel bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji t menggunakan hipotesis berikut:

1. Nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen tidak berdampak signifikan pada variabel dependen.

2. Sebaliknya, nilai probabilitas (p-value) lebih rendah dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen berdampak signifikan pada variabel dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Karesidenan merupakan sistem pembagian wilayah administratif yang diberlakukan pada masa penjajahan Hindia Belanda, khususnya di wilayah-wilayah berpenduduk padat seperti Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Lombok. Meskipun sistem administratif ini telah dihapuskan secara resmi sejak era 1950-an, istilah “karesidenan” masih sering digunakan secara tidak resmi hingga kini, terutama dalam konteks budaya, penamaan wilayah, dan pengelompokan regional di beberapa provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah yang hingga kini secara kultural masih mengenal enam wilayah eks karesidenan, yakni Karesidenan Surakarta, Pati, Kedu, Semarang, Pekalongan, dan Banyumas. Fokus penelitian ini diarahkan pada Eks Karesidenan Pati yang mencakup enam kabupaten, yaitu Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, dan Jepara. Kawasan ini dipilih karena memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang kompleks dan beragam, serta menunjukkan dinamika pembangunan yang relatif tertinggal dibanding wilayah karesidenan lainnya di Jawa Tengah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah sejauh mana pengaruh variabel-variabel pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah Eks Karesidenan Pati selama periode 2015 hingga 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang tersedia melalui publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), baik provinsi maupun kabupaten. Terdapat 54 jumlah observasi dalam penelitian ini, hasil dari kombinasi 6 kabupaten dikalikan 9 tahun pengamatan. Namun demikian, terdapat kekosongan data pada tahun 2016 untuk variabel tingkat pengangguran di beberapa kabupaten, sehingga jumlah observasi 48. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, yang berarti seluruh populasi data yang tersedia digunakan sebagai sampel karena dianggap representatif, lengkap, dan layak dianalisis secara menyeluruh. Data yang digunakan adalah data sekunder

dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah serta publikasi daerah kabupaten masing-masing.

4.2 Tabulasi Data Variabel

Berikut ini adalah tabulasi data untuk masing-masing variabel penelitian, yaitu:

1. Y (Kemiskinan)
2. X1 (Indeks Pembangunan Manusia / IPM)
3. X2 (Pendapatan per Kapita)
4. X3 (Pengangguran)

Tabel 4.1 Data Tingkat Kemiskinan di eks Karesidenan Pati 2015–2023 (persen)

Tahun	Grobogan	Blora	Pati	Rembang	Kudus	Jejara
2015	13,68	13,52	11,95	19,28	7,73	8,50
2016	13,57	13,33	11,65	18,54	7,65	8,35
2017	13,27	13,04	11,38	18,35	7,59	8,12
2018	12,31	11,90	9,90	15,41	6,98	7,00
2019	11,77	11,32	9,46	14,95	6,68	6,66
2020	12,46	11,96	10,08	15,60	7,31	7,17
2021	12,74	12,39	10,21	15,80	7,60	7,44
2022	11,80	11,53	9,33	14,65	7,41	6,88
2023	11,72	11,49	9,31	14,17	7,24	6,61

Tabel 4.2 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di eks Karesidenan Pati 2015-2023 (persen)

Tahun	Grobogan	Blora	Pati	Rembang	Kudus	Jejara
2015	68,05	66,61	68,51	68,18	72,72	70,02
2016	68,52	66,61	69,03	68,60	72,94	70,25
2017	68,87	67,52	70,12	68,95	73,84	70,79
2018	69,32	67,95	70,71	69,46	74,84	71,38
2019	69,86	68,65	71,35	70,20	74,94	71,88
2020	69,87	68,84	71,77	70,02	75,00	71,99

2021	70,41	69,37	72,28	70,02	75,16	72,36
2022	70,91	69,95	73,14	71,00	75,89	73,15
2023	71,49	70,63	73,59	71,89	76,71	73,85

**Tabel 4.3 Data PDRB Per Kapita di Karesidenan Pati
2015-2023 (ribu rupiah)**

Tahun	Grobogan	Blora	Pati	Rembang	Kudus	Jepara
2015	11812	15119	20090	17469	78226	14483
2016	12281	18601	21073	18303	79239	14995
2017	12935	19638	22149	19430	80826	15578
2018	13625	20421	23290	20423	82478	16258
2019	14359	21277	24642	21427	84462	17079
2020	13356	19781	23090	20802	83661	17714
2021	13735	20406	23633	21444	81583	18341
2022	14414	20792	24721	22445	82498	19232
2023	14492	21283	25736	23424	83441	20024

**Tabel 4.4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka di
Karesidenan Pati 2015-2023 (persen)**

Tahun	Grobogan	Blora	Pati	Rembang	Kudus	Jepara
2015	5,22	4,68	4,43	4,51	5,04	3,12
2016	-	-	-	-	-	-
2017	3,02	2,85	3,83	3,19	3,56	4,84
2018	2,22	3,30	3,57	2,83	3,28	3,75
2019	3,54	3,82	3,64	3,60	3,80	2,92
2020	4,50	4,89	4,74	4,83	5,53	6,70
2021	4,38	3,81	4,60	3,67	3,77	4,23
2022	4,40	3,70	4,45	1,76	3,21	4,10
2023	4,02	3,10	4,29	2,60	3,25	3,35

4.3 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Melakukan uji statistik pada Eviews 13 untuk menggambarkan data secara statistik. Berdasarkan statistik deskriptif yang dihasilkan dari pengolahan data menunjukkan karakter sampel yang digunakan dalam penelitian, seperti jumlah rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Penjelasan deskripsi dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu kemiskinan dan variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan per kapita, dan tingkat pengangguran. Analisis data statistik deskriptif penelitian bisa dilihat di tabel berikut

Tabel 4. 5 Uji Analisis Deskriptif

	KEMISKINAN	IPM	PDRB_PER_PENGANG KAPITA	GURAN
Mean	10.90938	71.31271	29105.90	3.884167
Median	11.43500	70.91000	20413.50	3.785000
Maximum	19.28000	76.71000	84462.00	6.700000
Minimum	6.610000	68.05000	2329.000	1.760000
Std. Dev.	3.244072	2.158796	24333.25	0.894622
Skewness	0.467281	0.629611	1.673080	0.404148
Kurtosis	2.594414	2.679418	4.032182	3.933139
Jarque-Bera	2.075814	3.376824	24.52438	3.048181
Probability	0.354195	0.184813	0.000005	0.217819
Sum	523.6500	3423.010	1397083.	186.4400
Sum Sq. Dev.	494.6283	219.0387	2.78E+10	37.61637

Observations	48	48	48	48
--------------	----	----	----	----

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13

Dari Tabel 4.5 menunjukkan statistik deskriptif jika jumlah sampel yang diteliti 48 observasi data yang berasal dari 6 kabupaten selama 9 tahun, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai tabel di atas berdasarkan masing-masing kolom tabel:

1. Variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari 48 observasi. Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata IPM selama periode 2015-2023 adalah 71.31%, dengan nilai tertinggi mencapai 76.71% dan nilai terendah sebesar 68.05%. Adapun standar deviasi untuk IPM adalah 2.16%.
2. Variabel independen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terdiri dari 48 observasi. Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata PDRB per kapita selama periode 2015-2023 adalah Rp 29.105,90 (dalam ribuan), dengan nilai tertinggi Rp 84.462,00 (dalam ribuan) dan nilai terendah Rp 2.329,00 (dalam ribuan). Standar deviasi untuk PDRB per kapita adalah Rp 24.333,25 (dalam ribuan).
3. Variabel independen tingkat pengangguran terdiri dari 48 observasi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran selama periode 2015-2023 adalah 3.88%, dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 6.70% dan terendah 1.76%. Standar deviasi untuk tingkat pengangguran adalah 0.89%.
4. Variabel dependen tingkat kemiskinan mencakup 48 observasi. Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata jumlah penduduk miskin selama periode 2015-2023 adalah 10.90%, dengan jumlah penduduk miskin tertinggi sebanyak 19.28% dan terendah sebanyak 6.61%. Standar deviasi untuk tingkat kemiskinan adalah 3.24%.

4.3.2. Analisis Data

4.3.2.1. Model Estimasi Data Panel

- a. Data panel, yang terdiri dari gabungan data cross-section dan data time series, digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting

yang didasarkan pada pengamatan objek pada waktu yang berbeda. Diperlukan untuk menguji setiap model persamaan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dengan regresi data panel. Metode yang paling efektif dari model ini adalah:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Tabel 4.6 Hasil Uji Common Effect

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/11/25 Time: 10:47

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111.1984	15.65002	7.105319	0.0000
IPM	-1.388875	0.225066	-6.170966	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	3.06E-05	2.00E-05	1.531262	0.1329
PENGANGGURAN	-0.549528	0.343637	-1.599151	0.1169
R-squared	0.604950	Mean dependent var	10.90938	
Adjusted R-squared	0.578015	S.D. dependent var	3.244072	
S.E. of regression	2.107362	Akaike info criterion	4.408406	
Sum squared resid	195.4029	Schwarz criterion	4.564340	
Log likelihood	-101.8018	Hannan-Quinn criter.	4.467334	

F-statistic	22.45944	Durbin-Watson stat	0.231928
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah dengan Eviews 13

Dari hasil regresi di atas menggunakan *Common Effect Model* menjelaskan jika terjadi konstanta sebesar 111.1984 dengan probabilitas ialah 0.0000. Kemudian untuk persamaan regresi pada nilai adjusted R sebesar 0.578015. Hal ini mengartikan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh IPM, PDRB per kapita dan pengangguran sebesar 57% dan sisanya 43% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Tabel 4.7 Hasil Uji Fixed Effect

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/11/25 Time: 10:48

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50.62483	6.873930	7.364757	0.0000
IPM	-0.567648	0.101733	-5.579797	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	6.64E-06	3.59E-05	0.185070	0.8541
PENGANGGURAN	0.147211	0.121768	1.208951	0.2340
Effects Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961346	Mean dependent var	10.90938
Adjusted R-squared	0.953417	S.D. dependent var	3.244072
S.E. of regression	0.700172	Akaike info criterion	2.292380
Sum squared resid	19.11940	Schwarz criterion	2.643230
Log likelihood	-46.01711	Hannan-Quinn criter.	2.424967
F-statistic	121.2436	Durbin-Watson stat	1.043322
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah dengan Eviews 13

Dari hasil regresi dengan metode *Fixed Effect Model* menjelaskan jika terdapat nilai konstanta sebesar 50.62483 dengan probabilitas sebesar 0.0000. untuk persamaan regresi pada nilai adjusted R ialah 0.953417 sehingga dapat diartikan jika tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh IPM, PDRB per kapita dan pengangguran sebesar 95% dan sisanya 5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

3. *Random Effect Model (REM)*

Tabel 4.8 Hasil Uji Random Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/11/25 Time: 10:50

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	52.35776	6.733318	7.775923	0.0000
IPM	-0.583656	0.096898	-6.023404	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	-1.04E-05	2.32E-05	-0.446345	0.6575
PENGANGGURAN	0.122415	0.121433	1.008092	0.3189
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.556519	0.8317
Idiosyncratic random			0.700172	0.1683
Weighted Statistics				
R-squared	0.516573	Mean dependent var		1.713488
Adjusted R-squared	0.483612	S.D. dependent var		1.063101
S.E. of regression	0.763946	Sum squared resid		25.67900
F-statistic	15.67229	Durbin-Watson stat		0.796112
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.442295	Mean dependent var		10.90938
Sum squared resid	275.8568	Durbin-Watson stat		0.074109

Sumber: Diolah dengan Eviews 13

Dari hasil regresi dengan metode *Random Effect Model* menjelaskan jika terdapat nilai konstanta sebesar 52.35776 dengan probabilitas sebesar 0.0000. untuk persamaan regresi pada nilai adjusted R ialah 0.483612 sehingga dapat diartikan jika tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh IPM, PDRB per kapita dan

pengangguran sebesar 48% dan sisanya 52% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

4.3.2.2. Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model regresi data panel mana yang paling cocok antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM).⁸⁴

H_0 : diterima, model CEM berhenti menguji

H_0 ditolak, model FEM digunakan untuk menguji ulang uji Hausman.

Apabila nilai probabilitas F-statistik lebih dari 0,05, maka H_0 diterima, dan model Common Effect Model berhenti menguji sampai titik ini. Jika nilai probabilitas F-statistik kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Dalam hal ini, Fixed Effect Model tetap digunakan untuk menguji ulang uji Hausman. Hasil pengolahan Uji Chow dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	71.917059	(5,39)	0.0000
Cross-section Chi-square	111.569274	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

⁸⁴ Nardi Sudarno and L.N.R Ula, "Model Regresi Data Panel Simultan," *Jurnal Gaussian*, 2016, 611–21.

Date: 03/11/25 Time: 11:03

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111.1984	15.65002	7.105319	0.0000
IPM	-1.388875	0.225066	-6.170966	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	3.06E-05	2.00E-05	1.531262	0.1329
PENGANGGURAN	-0.549528	0.343637	-1.599151	0.1169
R-squared	0.604950	Mean dependent var	10.90938	
Adjusted R-squared	0.578015	S.D. dependent var	3.244072	
S.E. of regression	2.107362	Akaike info criterion	4.408406	
Sum squared resid	195.4029	Schwarz criterion	4.564340	
Log likelihood	-101.8018	Hannan-Quinn criter.	4.467334	
F-statistic	22.45944	Durbin-Watson stat	0.231928	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews 13

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 4.9 diketahui nilai probabilitas adalah 0.0000. Karena nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara Random Effect Model (REM) atau Fixed Effect Model (FEM). Uji ini dilakukan berdasarkan hipotesis sebagai berikut:

Ho: diterima, maka Random Effect

Ho: ditolak, Fixed Effect Model diterima.

Jika nilai probabilitas chi-square p-value adalah lebih dari 0,05, Ho diterima, yang menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah pendekatan Random Effect Model. Namun, jika nilai probabilitas chi-square p adalah kurang dari 0,05, Ho ditolak. Maka, model yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Hasil pengolahan Uji Hausman dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.380348	3	0.0098

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IPM	-0.567648	-0.583656	0.000960	0.6055
PDRB_PER_KAPITA	0.000007	-0.000010	0.000000	0.5340
PENGANGGURAN	0.147211	0.122415	0.000081	0.0060

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/11/25 Time: 11:05

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50.62483	6.873930	7.364757	0.0000
IPM	-0.567648	0.101733	-5.579797	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	6.64E-06	3.59E-05	0.185070	0.8541
PENGANGGURAN	0.147211	0.121768	1.208951	0.2340

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961346	Mean dependent var	10.90938
Adjusted R-squared	0.953417	S.D. dependent var	3.244072
S.E. of regression	0.700172	Akaike info criterion	2.292380
Sum squared resid	19.11940	Schwarz criterion	2.643230
Log likelihood	-46.01711	Hannan-Quinn criter.	2.424967
F-statistic	121.2436	Durbin-Watson stat	1.043322
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13

Berdasarkan hasil dari Uji Hausman pada Tabel 4.10 diketahui nilai probabilitas sebesar 0.0098. karena nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

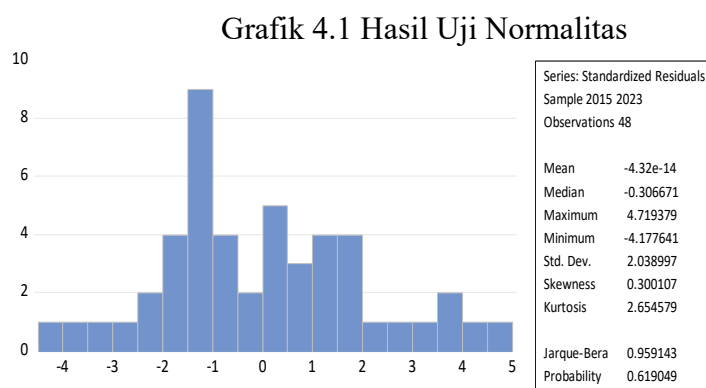
3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih model terbaik antara Random Effect Model (REM) dan Common Effect Model (CEM). Namun, uji Chow menemukan hasil dari Fixed Effect Model (FEM), dan uji Hausman menemukan hasil dari Fixed Effect Model (FEM), sehingga uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan.

4.3.2.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas dan multikolinearitas, dilakukan setelah menentukan model yang tepat untuk analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

1. Uji Normalitas



Sumber: Data diolah dengan Eviews 13

Dari Grafik 4.1 diketahui bahwa nilai probability sebesar 0.619049 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0.005 ($0.619049 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

	IPM	PDRB_PER_KAPITA	PENGANGGURAN
IPM	1.000000	0.774403	0.014997
PDRB_PER_KAPITA	0.774403	1.000000	0.010788
PENGANGGURAN	0.014997	0.010788	1.000000

Sumber: Diolah dengan Eviews 13

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui jika nilai korelasi antara X_1 dengan X_2 sebesar 0.774403. Nilai korelasi antara X_1 dengan X_3 sebesar 0.014997. Nilai korelasi antara X_2 dengan X_1 sebesar 0.77443. Nilai korelasi antara X_2 dan X_3 sebesar 0.010788. Nilai korelasi antara X_3 dengan X_1 sebesar 0.014997. Nilai korelasi antara X_3 dengan X_2 sebesar 0.010788.

4.3.3. Uji Signifikansi/Uji Hipotesis

Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang dipilih berdasarkan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier.

Tabel 4.12 Uji Hipotesis

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/11/25 Time: 10:48

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50.62483	6.873930	7.364757	0.0000
IPM	-0.567648	0.101733	-5.579797	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	6.64E-06	3.59E-05	0.185070	0.8541

PENGANGGURAN	0.147211	0.121768	1.208951	0.2340
--------------	----------	----------	----------	--------

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961346	Mean dependent var	10.90938
Adjusted R-squared	0.953417	S.D. dependent var	3.244072
S.E. of regression	0.700172	Akaike info criterion	2.292380
Sum squared resid	19.11940	Schwarz criterion	2.643230
Log likelihood	-46.01711	Hannan-Quinn criter.	2.424967
F-statistic	121.2436	Durbin-Watson stat	1.043322
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: diolah dengan Eviews 13

Dari Tabel 4.12 dapat disusun persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 50.62483 - 0.567648 X_1 + 6.64E-06 X_2 + 0.147211 X_3$$

1. Nilai konstanta bernilai positif yaitu 50.62483, hal ini menunjukkan bahwa apabila X_1 , X_2 , X_3 konstan, maka Y sebesar 50.62483
2. Koefisien regresi variabel X_1 bernilai negatif yaitu - 0.567648. Hal ini menunjukkan apabila X_1 meningkat maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.567648 dengan anggapan variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi variabel X_2 bernilai positif yaitu 6.64E-06. Hal ini menunjukkan apabila X_2 meningkat maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 6.64E-06 dengan anggapan variabel lainnya konstan.
4. Koefisien regresi variabel X_3 bernilai positif yaitu 0.147211. Hal ini menunjukkan apabila X_3 meningkat maka Tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0.147211 dengan anggapan variabel lain konstan.

4.3.3.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4. 13 Hasil Uji F

R-squared	0.961346
Adjusted R-squared	0.953417
S.E. of regression	0.700172
Sum squared resid	19.11940
Log likelihood	-46.01711
F-statistic	121.2436
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4.13 diketahui Nilai Prob (F-statistic) adalah 0.000000, dan nilai F hitung adalah 121.2436, yang lebih besar dari 2.816466. Sebagai hasilnya, H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi ($< 0,05$). Oleh karena itu, IPM (X_1), PDRB per kapita (X_2), dan pengangguran (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) secara bersamaan.

4.3.3.2. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Tabel 4.14 Hasil Uji t

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/11/25 Time: 10:48

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50.62483	6.873930	7.364757	0.0000
IPM	-0.567648	0.101733	-5.579797	0.0000

PDRB_PER_KAPITA	6.64E-06	3.59E-05	0.185070	0.8541
PENGANGGURAN	0.147211	0.121768	1.208951	0.2340

Sumber: diolah dengan Eviews 13

Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 4.14 maka disimpulkan uji t masing-masing variabel:

1. Variabel IPM (X_1) dari hasil pengujian t menunjukkan nilai t hitung sebesar $-5.5798 > 2.015368$ dan nilai sig 0.0000 kurang dari 0,05.
2. Variabel PDRB per kapita (X_2) menunjukkan nilai t hitung sebesar $0.185070 < 2.015368$ dan nilai sig 0.8541 lebih besar dari 0,05.
3. Variabel pengangguran (X_3) menunjukkan nilai t hitung sebesar 1.208951 < 2.015368 dan nilai sig 0.2340 lebih dari 0,05.

4.3.3.3. Uji Determinasi/Uji R Square

Tabel 4.15 Hasil Uji Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961346	Mean dependent var	10.90938
Adjusted R-squared	0.953417	S.D. dependent var	3.244072
S.E. of regression	0.700172	Akaike info criterion	2.292380
Sum squared resid	19.11940	Schwarz criterion	2.643230
Log likelihood	-46.01711	Hannan-Quinn criter.	2.424967
F-statistic	121.2436	Durbin-Watson stat	1.043322
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: diolah dengan Eviews 13

Berdasarkan Tabel 4.15, besaran nilai koefisien determinasi berganda (R square) sebesar 0.953417 atau sebesar 95,34%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari IPM (X_1), PDRB per kapita (X_2), dan Pengangguran (X_3) mampu menjelaskan variabel

Tingkat kemiskinan sebesar 95,34% di Eks Karesidenan Pati, sedangkan sisanya 4,66% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari variabel penelitian ini.

4.4 Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (X_1) memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks Karesidenan Pati. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} -5.5798 lebih besar daripada nilai t_{tabel} 2.015368, dan tingkat sigifikansi 0.0000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, H_1 yang menyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan di eks Karesidenan Pati dapat diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan, hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang berujung pada pengurangan tingkat kemiskinan. IPM mencakup berbagai aspek penting, seperti kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, yang merupakan indikator utama dalam mengukur kesejahteraan di suatu daerah. Oleh karena itu, peningkatan IPM di wilayah eks Karesidenan Pati kemungkinan besar disebabkan oleh adanya kemajuan dalam sektor pendidikan, perbaikan akses terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan pendapatan yang memberikan kontribusi pada perbaikan taraf hidup masyarakat.

Dengan semakin meningkatnya IPM, masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik, memperoleh layanan kesehatan yang lebih memadai, dan menjadi lebih produktif. Hal ini membuka peluang bagi mereka untuk mengakses pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan stabil, yang pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan. Sebagai contoh, perbaikan kualitas pendidikan dapat menghasilkan angkatan kerja yang lebih terampil, sehingga mereka memiliki akses lebih besar terhadap pekerjaan yang lebih berkualitas. Selain itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat mengurangi tingkat kesakitan dan meningkatkan kapasitas produktivitas, yang turut mendukung perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori modal manusia (*human capital theory*) yang menjelaskan bahwa investasi dalam pengembangan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan individu dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada, yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan dalam suatu komunitas, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dan bernilai tinggi, yang akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Di wilayah eks Karesidenan Pati, peningkatan IPM mencerminkan adanya penguatan modal manusia yang akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, teori maqasid syariah juga sangat relevan dengan hasil ini. Salah satu tujuan utama maqasid syariah adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat, terutama dalam dimensi ekonomi. Maqasid syariah menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang optimal, dan akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi. Peningkatan IPM di wilayah ini selaras dengan tujuan maqasid syariah, karena menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan produktif, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.

Hasil ini selaras dengan penelitian Frido Evindey Manihuruk dan Joko Suharianto, "Analisis Pengaruh IPM, TPT, Dan UMR Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Dengan Menggunakan Regresi Data Panel", menunjukkan bahwa IPM juga terbukti negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Studi ini menggunakan regresi data panel untuk 34 provinsi selama tahun 2018–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan IPM berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, dengan koefisien determinasi mencapai 99,79%. Ini menegaskan bahwa IPM sebagai indikator kualitas hidup melalui aspek Pendidikan, kesehatan, dan daya beli memegang peranan penting dalam mengurangi kemiskinan.⁸⁵

⁸⁵ Frido Evindey Manihuruk and Joko Suharianto, "Analisis Pengaruh Ipm, Tpt, Dan Umr Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Dengan Menggunakan Regresi Data Panel,"

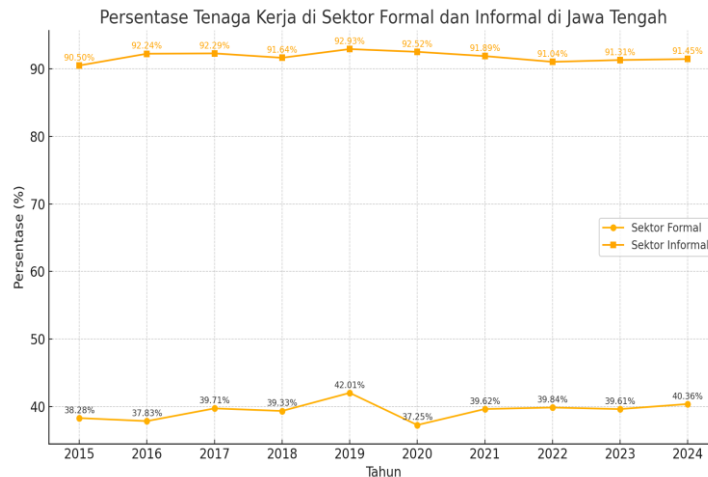
4.4.2. Pengaruh Pendapatan Per Kapita (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita (X_2) tidak berdampak pada tingkat kemiskinan di wilayah eks Karesidenan Pati. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 0.185070 lebih rendah daripada nilai t_{tabel} 2.015368, dan tingkat signifikansi 0,8541 lebih tinggi daripada 0.05. Sehingga H_2 ditolak karena menyatakan bahwa kemiskinan di Karesidenan Pati dipengaruhi negatif oleh pendapatan per kapita.

Hal ini berarti bahwa peningkatan PDRB per kapita di wilayah Eks Karesidenan Pati tidak memiliki pengaruh nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Secara teoritis, peningkatan pendapatan per kapita di tingkat makroekonomi idealnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, karena pertumbuhan pendapatan per individu diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, dalam kenyataan yang terjadi di Eks Karesidenan Pati, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak secara proporsional dirasakan oleh semua kelompok sosial, terutama kelompok masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan, di mana penduduk berpenghasilan rendah tetap kesulitan mengakses manfaat pertumbuhan ekonomi, meskipun indikator makro menunjukkan peningkatan. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor penting mengapa peningkatan PDRB per kapita belum mampu secara efektif mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

Selain itu, faktor lain yang memperkuat ketimpangan ini adalah struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi sektor informal. Berikut grafik 4.2 persentase tenaga kerja di sektor formal dan sektor informal di Jawa Tengah

Grafik 4.2 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Formal dan Informal di Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025

Berdasarkan Grafik 4.2, dapat diamati bahwa selama periode 2015 hingga 2024, sebagian besar pekerja berada di sektor informal dengan persentase lebih dari 90%. Sementara itu, sektor formal yang menawarkan stabilitas kerja, upah tetap, dan jaminan perlindungan sosial hanya mencakup sekitar 37% hingga 42% dari total tenaga kerja. Ketergantungan yang besar pada sektor informal menyebabkan banyak tenaga kerja tidak memiliki pendapatan yang konsisten, tidak terlindungi dari risiko ekonomi, dan lebih rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Akibatnya, meskipun PDRB per kapita meningkat, perbaikan kesejahteraan bagi pekerja sektor informal berlangsung lambat dan tidak signifikan, sehingga tidak berkontribusi secara nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Situasi ini diperkuat oleh temuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan signifikan dari 6,48% pada tahun 2020 menjadi 4,78% pada Agustus 2024 hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas ketenagakerjaan. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang terserap ke dalam sektor informal, bukan karena meluasnya lapangan kerja formal yang mapan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat bahwa dari sekitar 20,86 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 12,44 juta orang (lebih dari

59%) beraktivitas di sektor informal. Pekerjaan di sektor ini umumnya tidak memiliki perlindungan hukum, tidak menjamin kestabilan pendapatan, serta belum mencakup fasilitas jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun pengangguran menurun, sebagian besar tenaga kerja masih berada dalam posisi rentan secara ekonomi.

Kepala BPS Jawa Tengah mengingatkan bahwa dominasi sektor informal bisa menjadi hambatan struktural dalam pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Jika tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan, akses pelatihan keterampilan, dan perluasan jaminan sosial, maka ketergantungan terhadap sektor informal justru dapat memperdalam kesenjangan dan memperkuat siklus kemiskinan. Oleh karena itu, perhatian serius diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja benar-benar mampu mendorong kesejahteraan jangka panjang.⁸⁶

Dilihat dari perspektif Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*), kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Eks Karesidenan Pati berkaitan erat dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Teori ini menegaskan bahwa pendidikan, keterampilan, dan kesehatan adalah faktor kunci yang menentukan produktivitas individu, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Ketika mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah dan minim keterampilan, khususnya yang bekerja di sektor informal, mereka akan sulit beradaptasi dan memanfaatkan peluang ekonomi baru. Oleh karena itu, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, kelompok ini tetap terpinggirkan. Dengan demikian, investasi pada pengembangan modal manusia, melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses layanan kesehatan, menjadi sangat penting untuk mendorong pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam teori Maqasid Syariah, hasil temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), dan harta (*hifzh al-mal*) sebagaimana ditekankan dalam prinsip syariah, belum terwujud secara

⁸⁶<https://jateng.suara.com/read/2024/11/05/182952/pengangguran-jateng-turun-drastis-tapi-waspada-jebakan-sektor-informal>

optimal di wilayah ini. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk mengakumulasi kekayaan, melainkan juga untuk memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Dominasi sektor informal, ketidakpastian penghasilan, serta minimnya jaminan sosial bagi pekerja bertentangan dengan prinsip maqasid yang menekankan pentingnya kemaslahatan bersama dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan sektor formal yang inklusif dan berkeadilan menjadi langkah strategis untuk mendekatkan realisasi tujuan maqasid syariah dalam pembangunan ekonomi di Eks Karesidenan Pati.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamrin dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.” Dalam penelitiannya, Tamrin menemukan bahwa variabel PDRB per kapita tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di sejumlah wilayah di Indonesia. Ia menekankan bahwa peningkatan PDRB sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi tidak selalu mampu menekan angka kemiskinan, terutama jika pertumbuhan tersebut bersifat tidak inklusif dan tidak menjangkau kelompok masyarakat miskin secara langsung.⁸⁷

4.4.3. Pengaruh Pengangguran (X₃) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran (X₃) tidak memiliki dampak yang signifikan atau positif terhadap tingkat kemiskinan di wilayah eks Karesidenan Pati. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1.208951 kurang dari nilai t_{tabel} 2.015368 dan nilai signifikansi sebesar 0.2340 kurang dari 0.05. Sehingga H₃ yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif di eks Karesidenan Pati ditolak.

Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat pengangguran di wilayah eks Karesidenan Pati, pengaruhnya terhadap kemiskinan tidak signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah

⁸⁷ Tamrin, “Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan,” 2023.

dominasi sektor informal di wilayah tersebut, di mana banyak individu yang tidak terdaftar sebagai pengangguran, meskipun mereka bekerja dalam pekerjaan yang tidak tercatat secara resmi. Pekerjaan di sektor informal sering kali memiliki pendapatan yang lebih rendah dan kondisi kerja yang lebih tidak stabil, namun memungkinkan individu untuk bertahan hidup meski tidak terlibat dalam sektor formal.

Selain itu juga disebabkan kualitas modal manusia yang rendah. Di wilayah yang memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang terbatas, orang-orang mungkin tidak terlibat dalam pengangguran jangka panjang meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Sebagai gantinya, mereka mungkin terpaksa beralih ke pekerjaan sementara atau sumber penghasilan yang tidak terdata sebagai pekerjaan formal. Akibatnya, meskipun pengangguran dapat terjadi, dampaknya terhadap kemiskinan menjadi relatif kecil.

Hasil ini berkaitan dengan teori modal manusia (*human capital theory*). Teori ini mengemukakan bahwa investasi dalam pendidikan, keterampilan, dan kesehatan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kemampuan mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Meskipun pengangguran tidak menunjukkan pengaruh signifikan, rendahnya kualitas modal manusia di wilayah tersebut dapat menjelaskan tingginya tingkat kemiskinan. Individu dengan keterampilan dan pendidikan yang terbatas lebih rentan untuk terjebak dalam pekerjaan dengan pendapatan rendah atau di sektor informal, yang pada gilirannya mempertahankan tingkat kemiskinan, meskipun mereka tidak dihitung sebagai pengangguran.

Teori maqasid syariah juga relevan dengan hasil ini, karena salah satu tujuan utama maqasid syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan yang memadai, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks ini, meskipun pengangguran tidak berpengaruh signifikan, upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan lebih banyak peluang kerja formal lebih sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid

syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Husnul Khatimah, yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan” menunjukkan bahwa pengangguran tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menyimpulkan bahwa meskipun tingkat pengangguran meningkat, hal ini tidak serta merta berdampak langsung pada peningkatan tingkat kemiskinan, terutama jika masyarakat tetap memiliki akses terhadap pekerjaan informal atau sumber pendapatan alternatif.⁸⁸

⁸⁸ Husnul Khatimah, “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan” (UIN Alaudin Makassar, 2021).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di eks Karesidenan Pati. Berdasarkan uji t , diperoleh nilai t *hitung* sebesar -5.5798, yang secara absolut lebih besar dari t *tabel* yaitu 2.015368, dengan nilai signifikansi $0.0000 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara statistik terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah eks Karesidenan Pati. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas manusia yang tercermin dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli, maka angka kemiskinan cenderung menurun. Temuan ini sejalan dengan teori human capital serta pendekatan maqasid syariah, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup manusia dalam rangka menanggulangi kemiskinan.
2. PDRB per kapita tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di eks Karesidenan Pati. Hal ini dapat dilihat pada nilai t *hitung* yang diperoleh adalah 0.185070, lebih kecil dari t *tabel* 2.015368, dengan tingkat signifikansi sebesar $0.8541 > 0.05$. Ini mengindikasikan bahwa meskipun pendapatan per kapita mengalami peningkatan, hal tersebut tidak secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan di eks Karesidenan Pati. Fenomena ini dapat disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan dan tingginya dominasi sektor informal, sehingga kelompok miskin tidak menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Pati ini belum merata atau inklusif.
3. Tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di eks Karesidenan Pati. Hal ini dapat dilihat pada uji menunjukkan t *hitung* sebesar 1.208951, lebih kecil dari t *tabel* 2.015368, dan nilai signifikansi $0.2340 > 0.05$. Hal ini menandakan bahwa secara statistik,

pengangguran tidak memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks Karesidenan Pati. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah keberadaan sektor informal yang besar, di mana sebagian masyarakat tetap bekerja namun dengan penghasilan rendah dan kondisi kerja yang tidak layak. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kualitas tenaga kerja dan akses terhadap pekerjaan yang layak di daerah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas, berikut merupakan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya serta untuk pemerintah daerah.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini masih terbatas pada tiga variabel utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita, dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian dengan menambahkan variabel lain yang relevan, seperti inflasi, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, atau belanja daerah, guna memperoleh hasil yang lebih menyeluruh dan komprehensif.
- b. Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih kompleks, seperti regresi spasial atau model dinamis jangka panjang, dapat memperkaya hasil kajian.
- c. Penelitian juga dapat diperluas ke wilayah lain di luar eks Karesidenan Pati atau menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab kemiskinan.

2. Bagi Pemerintah Daerah:

- a. Pemerintah daerah di wilayah eks Karesidenan Pati perlu mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan layanan kesehatan,

mengingat IPM berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

- b. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB per kapita, agar pertumbuhan tersebut benar-benar bersifat inklusif. Dorongan terhadap sektor-sektor produktif yang menyerap tenaga kerja miskin dan rentan harus ditingkatkan, guna menciptakan distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil.
- c. Program pengentasan kemiskinan juga hendaknya tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pekerjaan, terutama di sektor informal, melalui pelatihan keterampilan dan penyediaan perlindungan sosial.
- d. Pengembangan sistem pemantauan kemiskinan berbasis data mikro yang akurat sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Makassar: Syakir Media Press, 2023.
- Aisyah, Lisda, Mona Khairida Syafa, and Ghina Rabban. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2012-2022." *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandungan* 1, no. 1 (2023): 27–39. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Amri, Khairul. "Infrastruktur Transportasi Dan Kepadatan Penduduk Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2014): 438–50.
- Asmananta, Laura Nindya, Emi Yulia Siska, and Abdullah Sahroni. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2020." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2022): 114. <https://doi.org/10.30829/hf.v9i2.12820>.
- Becker, Gerry. *Human Capital; a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: the National Bureau of Economic Research, 1993.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Fadilah, Nurul., Agustin Susyatna. Dwi, and Sukiman. "Analisi Pengaruh Pendapatan per Kapita, Tingkat Penaguran, IPM Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* 11, no. 01 (2016): 18–26.
- Fatoni, Nur. "Peran Misykat (Micro Finance Syari'ah) DPU (Dompot Peduli Umat) Daaryt Tauhid Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* V (2014): 77–92.
- Fatri, Heldiana Ingrida Felisia, and Suryanto. "Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Melalui Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2022." *Soetomo Management Review* 3, no. 1 (2025): 1–13.
- Febrian Syuhada, Erwin, and Birusman N. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masyarakat Dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 346–61. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>.
- Febriani Sagala, Indah, Achmad Fajri Romadhoni, Annisya Mardiana, Ayu Widyasari, Demak Rotua Simamora, Dilla Nurfadiah, Ega Ananda, et al. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda." *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengelaturan Alam*

- 2, no. 2 (2024): 309–24. <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i2.3524>.
- Ferezegia, Debrina Vita. “Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan.” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 4, no. 1 (2018): 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>.
- Ilmi, Syaiful. “Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam.” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 67. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.918>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. “Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia Dan BPS,” 2025. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702>.
- Isabella, Elviani Veronica. “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh Tahun 2012-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Itang. “Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan.” *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2015): 1–30.
- Jhinghan, ML. *Ekonomi Pembangunan. Teori Dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2007.
- Khatimah, Husnul. “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan.” UIN Alaudin Makassar, 2021.
- Kusumaningrum, Ria, Umi Kulsum, Marsha Siti Aisyah Hafsari, and Della Rizki Ananda. “Perspektif Ekonomi Dan Bisnis Islam Mengenai Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2021.” *Sahid Business Journal* 2, no. 02 (2023): 63–76. <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v2i02.95>.
- Lucas, R. E. “On The Mechanics Of Economic Development.” *Journal of Monetary Economics* 3 (1988): 42.
- Lundahl. *Poverty: No Place Is Too Exalted for The Preaching of These Doctrines*. Routledge, 2005.
- Mahfud. “Kompensasi Dan Evaluasi Kinerja Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.” *Madani Syari'ah* 2, no. 1 (2019): 45–64.
- Manihuruk, Frido Evindey, and Joko Suharianto. “Analisis Pengaruh Ipm, Tpt, Dan Umr Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Dengan Menggunakan Regresi Data Panel.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Dan Ilmu Sosial* 18, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.19184/jpe.v18i2.47262>.
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson. *Pengantar Ekonomi*

- Makro*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Mankiw, N. Greogory. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mardiatmoko, Gun. “Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda.” *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan* 14, no. 3 (2020): 333–42. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>.
- Maulana, Muhamad Azis, Aan Julia, and Ade Yunita Mafruhah. “Pengaruh Indeks Pendidikan, Gini Rasio, Jumlah Penduduk, Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Enam Provinsi Indonesia Tahun 2015-2019.” *Bandung Conference Series: Economics Studies* 2, no. 1 (2022): 17–24. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.300>.
- Miftahussalam, Muhammad, and Mohammad Rofiuddin. “Pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia Dan Zakat Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah.” *Journal of Economics Research and Policy Studies* 1, no. 1 (2021): 40–54. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i1.63>.
- Mukhtar, Saparuddin, Ari Saptono, and As’ad Samsul Arifin. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies* 2, no. 2 (2019): 77–89. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.68>.
- Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muttaqien, Arif. *Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan: Rekonstruksi Arah Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Terbebas Dan Demokratis*. Jakarta: Khanata Pustaka LP3ES Indonesia, 20006.
- Nanga, Muana. *Makro Ekonomi Teori Masalah Dan Kebijakan*. Edisi perd. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nur Azizah, Aulia, and Binti Nur Asiyah. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2697–2718. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>.
- Nurjannah, Lapeti Sari, and Indri Yovita. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2002-2021.” *Jurnal Ekonmi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 567–74.
- O’Campo, Patricia, Agnes Molnar, Edwin Ng, Emilie Renahy, Christiane Mitchell, Ketan Shankardass, Alexander St John, Clara Bambra, and Caeless Muntaner. “Social Welfare Matters: A Realist Review of When, How, and Why Unemployment Insurance Impacts Poverty and Health.” *Social Science & Medicine* 132 (2015): 88–94.
- Oktavian, Andris Imania, Fivien Muslihatinningsih, and Endah Kurnia Lestari.

- “Pengaruh IPM, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2017-2021.” *Jurnal Ekuilibrium* 7, no. 1 (2023): 28. <https://doi.org/10.19184/jek.v7i1.33085>.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin dan U. Sulia Sukmawati. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): 217–40. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p04>.
- Purboningtyas, Indah, Retno Sari, Tian Guretno, Ari Dirgantara, Agustina Dwi, and M Al Haris. “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Analysis of The Influence of Open Unemployment Levels and Human Development Index on Poverty in Central Java Province.” *Jurnal Sains Dan Matematika Unpam* 3, no. 1 (2020): 81–88. <https://core.ac.uk/download/pdf/337609876.pdf>.
- Puspasari, Shinta. “Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja Terdidik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Perspektif Modal Manusia.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 16, no. 2 (2019): 194–209. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.500>.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Rahayu, Yunie. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi.” *EKONOMIS: Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 165. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.40>.
- Rama, Ali, and Makhilani. “Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah.” *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013).
- Ramdani, Martiyan. “Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012.” *Economics Development Analysis Journal* 4, no. 1 (2015): 58–64.
- Ras, Atma. “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.” *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* 11, no. 2 (2013): 233. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v11i2.278>.
- Ratih, Inayah Swasti, and Tamimah. “Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1689–99.
- Rohmah, Ida Syafa’atur, and Jalu Aji Prakoso. “Pengaruh Ipm, Rls, Tpt, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat.” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, no. 6 (2022): 255–66. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.294>.
- Samsudin, Harun; Dimas Sadiman; Irwan Pacrozi. *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit*. Sumatra Selatan: Bappeda Litbang Kabupaten

- Banyuasin, 2019.
- Sholistiyawati, Anik. "Pengaruh Sistem Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia : Sebuah Literature Review." *JECTH: Journal Economy* 3, no. 1 (2025).
- Simanjutak. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPEM FE UI, 2005.
- Sinaga, Murbanto, Sri Winda Hardiyanti Damanik, Rika Surianto Zalukhu, Rapat Piter Sony Hutauruk, and Daniel Collyn. "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias." *Jurnal Ekuilnomi* 5, no. 1 (2023): 140–52. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.699>.
- Sipahutar, Sindi Rahayu, and Adanan Murroh Nasution. "Pengaruh IPM, PDRB Perkapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara." *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023).
- Siregar, Nurintan Aisyah, and Zuriani Ritonga. "Analisis Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Labuhanbatu." *Jurnal Informatika* 6, no. 1 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.36987/informatika.v6i1.736>.
- Sjafi'i, Ahmad, and Nur Aini Hidayati. "Genjot Anggaran Pendidikan-Rendam Kemiskinan." *Gemari*, 2009, 68–69.
- Soeroto. *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Sofilda, Eleonora, Muhammad Zilal Hamzah, and Arip Syaman Sholeh. "Human Development And Poverty In Papua Province (An Analysis Of Simultaneous Approach On Panel Data Regression)." *OIDA International Journal of Sustainable Development* 06, no. 06 (2013): 51–62.
- Statistik, Badan Pusat. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Subhan, Moh. "Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018): 22–33. <https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.48>.
- Sudarno, Nardi, and L.N.R Ula. "Model Regresi Data Panel Simultan." *Jurnal Gaussian*, 2016, 611–21.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukirno. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ket. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. "Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)." *Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia* 8, no. 2 (2010): 359.
- Supriatna. *Kemiskinan: Teori, Fakta Dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC, 1997.
- Tamrin. "Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan," 2023.
- Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional-Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Thesia, Deljansen Yohanes, and Ni Luh Karmini. "Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 03 (2022): 271. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i03.p03>.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kese. Jakarta: Erlangga, 2012.
- . *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Yektiningsih, Endang. "Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018." *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 18, no. 2 (2018): 32–50. <https://doi.org/10.30742/jisa1822018528>.
- Yudanto, Daru, Rochaida, and Priyagus. "Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Inflasi Serta Suku Bunga Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Makanan Dan Non Makanan Serta Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat The Effect of Income per Capita and Inflation and Interest Rates on Household Consumption" 17, no. 2 (2020): 287–97.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian

Kabupaten	Tahun	Kemiskinan	IPM	PDRB_Per_Kapita	Pengangguran
Grobogan	2015	13,68	68,05	11812	5,22
Grobogan	2016	13,57	68,52	12281	
Grobogan	2017	13,27	68,87	12935	3,02
Grobogan	2018	12,31	69,32	13625	2,22
Grobogan	2019	11,77	69,86	14359	3,54
Grobogan	2020	12,46	69,87	13356	4,50
Grobogan	2021	12,74	70,41	13735	4,38
Grobogan	2022	11,8	70,91	14414	4,40
Grobogan	2023	11,72	71,49	14992	4,02
Blora	2015	13,52	68,05	15119	4,68
Blora	2016	13,33	68,52	18601	
Blora	2017	13,04	68,87	19638	2,85
Blora	2018	11,9	69,32	20421	3,3
Blora	2019	11,32	69,86	21277	3,82
Blora	2020	11,96	69,87	19781	4,89
Blora	2021	12,39	70,41	20406	3,81
Blora	2022	11,53	70,91	20792	3,7
Blora	2023	11,49	71,49	21283	3,1
Rembang	2015	19,28	68,18	17469	4,51
Rembang	2016	18,54	68,60	18303	
Rembang	2017	18,35	68,95	19430	3,19
Rembang	2018	15,41	69,46	20423	2,83
Rembang	2019	14,95	70,20	21427	3,60
Rembang	2020	15,60	70,02	20802	4,83
Rembang	2021	15,8	70,02	21444	3,67
Rembang	2022	14,65	71,00	22445	1,76
Rembang	2023	14,17	71,89	23424	2,60
Pati	2015	11,95	68,51	20090	4,43
Pati	2016	11,65	69,03	21073	
Pati	2017	11,38	70,12	22149	3,83
Pati	2018	9,9	70,71	2329	3,57
Pati	2019	9,46	71,35	24642	3,64
Pati	2020	10,08	71,77	23090	4,74
Pati	2021	10,21	72,28	23633	4,6
Pati	2022	9,33	73,14	24721	4,45
Pati	2023	9,31	73,59	25736	4,29
Kudus	2015	7,73	72,72	78226	5,04
Kudus	2016	7,65	72,94	79239	

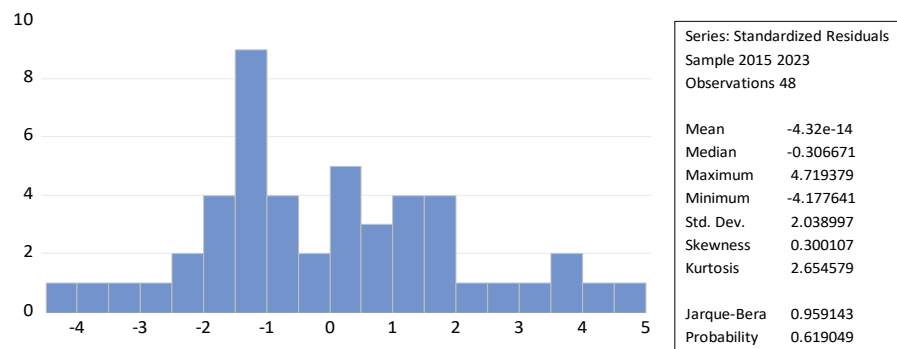
Kudus	2017	7,59	73,84	80826	3,56
Kudus	2018	6,98	74,58	82478	3,28
Kudus	2019	6,68	74,94	84462	3,80
Kudus	2020	7,31	75,00	83661	5,53
Kudus	2021	7,60	75,16	81583	3,77
Kudus	2022	7,41	75,89	82498	3,21
Kudus	2023	7,24	76,71	83441	3,25
Jepara	2015	8,50	70,02	14483	3,12
Jepara	2016	8,35	70,25	14995	
Jepara	2017	8,12	70,79	15578	4,84
Jepara	2018	7,00	71,38	16258	3,75
Jepara	2019	6,66	71,88	17079	2,92
Jepara	2020	7,17	71,99	17714	6,70
Jepara	2021	7,44	72,36	18341	4,23
Jepara	2022	6,88	73,15	19232	4,10
Jepara	2023	6,61	73,85	20024	3,35

Lampiran 2: Analisis Deskriptif

	KEMISKINAN	IPM	PDRB_PER_KAPITA	PENGANGGURAN
Mean	10.90938	71.31271	29105.90	3.884167
Median	11.43500	70.91000	20413.50	3.785000
Maximum	19.28000	76.71000	84462.00	6.700000
Minimum	6.610000	68.05000	2329.000	1.760000
Std. Dev.	3.244072	2.158796	24333.25	0.894622
Skewness	0.467281	0.629611	1.673080	0.404148
Kurtosis	2.594414	2.679418	4.032182	3.933139
Jarque-Bera	2.075814	3.376824	24.52438	3.048181
Probability	0.354195	0.184813	0.000005	0.217819
Sum	523.6500	3423.010	1397083.	186.4400
Sum Sq. Dev.	494.6283	219.0387	2.78E+10	37.61637
Observations	48	48	48	48

Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



2. Uji Multikolinearitas

	IPM	PDRB_PER_KAPITA	PENGANGGURAN
IPM	1.000000	0.774403	0.014997
PDRB_PER_KAPITA	0.774403	1.000000	0.010788
PENGANGGURAN	0.014997	0.010788	1.000000

Lampiran 4: Uji Hipotesis

1. Uji F

R-squared	0.961346
Adjusted R-squared	0.953417
S.E. of regression	0.700172
Sum squared resid	19.11940
Log likelihood	-46.01711
F-statistic	121.2436
Prob(F-statistic)	0.000000

2. Uji t

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/11/25 Time: 10:48

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50.62483	6.873930	7.364757	0.0000
IPM	-0.567648	0.101733	-5.579797	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	6.64E-06	3.59E-05	0.185070	0.8541
PENGANGGURAN	0.147211	0.121768	1.208951	0.2340

3. Uji Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961346	Mean dependent var	10.90938
Adjusted R-squared	0.953417	S.D. dependent var	3.244072
S.E. of regression	0.700172	Akaike info criterion	2.292380
Sum squared resid	19.11940	Schwarz criterion	2.643230
Log likelihood	-46.01711	Hannan-Quinn criter.	2.424967
F-statistic	121.2436	Durbin-Watson stat	1.043322
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5: Uji Regresi Data Panel

1.Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/11/25 Time: 10:47

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111.1984	15.65002	7.105319	0.0000
IPM	-1.388875	0.225066	-6.170966	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	3.06E-05	2.00E-05	1.531262	0.1329
PENGANGGURAN	-0.549528	0.343637	-1.599151	0.1169
R-squared	0.604950	Mean dependent var		10.90938
Adjusted R-squared	0.578015	S.D. dependent var		3.244072
S.E. of regression	2.107362	Akaike info criterion		4.408406
Sum squared resid	195.4029	Schwarz criterion		4.564340
Log likelihood	-101.8018	Hannan-Quinn criter.		4.467334
F-statistic	22.45944	Durbin-Watson stat		0.231928
Prob(F-statistic)	0.000000			

2.Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/11/25 Time: 10:48

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50.62483	6.873930	7.364757	0.0000
IPM	-0.567648	0.101733	-5.579797	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	6.64E-06	3.59E-05	0.185070	0.8541
PENGANGGURAN	0.147211	0.121768	1.208951	0.2340
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.961346	Mean dependent var	10.90938	
Adjusted R-squared	0.953417	S.D. dependent var	3.244072	
S.E. of regression	0.700172	Akaike info criterion	2.292380	
Sum squared resid	19.11940	Schwarz criterion	2.643230	
Log likelihood	-46.01711	Hannan-Quinn criter.	2.424967	
F-statistic	121.2436	Durbin-Watson stat	1.043322	
Prob(F-statistic)	0.000000			

3.Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/11/25 Time: 10:50

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	52.35776	6.733318	7.775923	0.0000
IPM	-0.583656	0.096898	-6.023404	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	-1.04E-05	2.32E-05	-0.446345	0.6575
PENGANGGURAN	0.122415	0.121433	1.008092	0.3189
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.556519	0.8317
Idiosyncratic random			0.700172	0.1683
Weighted Statistics				
R-squared	0.516573	Mean dependent var		1.713488
Adjusted R-squared	0.483612	S.D. dependent var		1.063101
S.E. of regression	0.763946	Sum squared resid		25.67900
F-statistic	15.67229	Durbin-Watson stat		0.796112
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.442295	Mean dependent var		10.90938
Sum squared resid	275.8568	Durbin-Watson stat		0.074109

4. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	71.917059	(5,39)	0.0000
Cross-section Chi-square	111.569274	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/11/25 Time: 11:03

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111.1984	15.65002	7.105319	0.0000
IPM	-1.388875	0.225066	-6.170966	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	3.06E-05	2.00E-05	1.531262	0.1329
PENGANGGURAN	-0.549528	0.343637	-1.599151	0.1169
R-squared	0.604950	Mean dependent var	10.90938	
Adjusted R-squared	0.578015	S.D. dependent var	3.244072	

S.E. of regression	2.107362	Akaike info criterion	4.408406
Sum squared resid	195.4029	Schwarz criterion	4.564340
Log likelihood	-101.8018	Hannan-Quinn criter.	4.467334
F-statistic	22.45944	Durbin-Watson stat	0.231928
Prob(F-statistic)	0.000000		

5.Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.380348	3	0.0098

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IPM	-0.567648	-0.583656	0.000960	0.6055
PDRB_PER_KAPITA	0.000007	-0.000010	0.000000	0.5340
PENGANGGURAN	0.147211	0.122415	0.000081	0.0060

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/11/25 Time: 11:05

Sample: 2015 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50.62483	6.873930	7.364757	0.0000
IPM	-0.567648	0.101733	-5.579797	0.0000
PDRB_PER_KAPITA	6.64E-06	3.59E-05	0.185070	0.8541
PENGANGGURAN	0.147211	0.121768	1.208951	0.2340

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961346	Mean dependent var	10.90938
Adjusted R-squared	0.953417	S.D. dependent var	3.244072
S.E. of regression	0.700172	Akaike info criterion	2.292380
Sum squared resid	19.11940	Schwarz criterion	2.643230
Log likelihood	-46.01711	Hannan-Quinn criter.	2.424967
F-statistic	121.2436	Durbin-Watson stat	1.043322
Prob(F-statistic)	0.000000		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sintiya Wati

Agama : Islam

Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 27 Februari 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Bacem RT02/RW01, Jepon, Blora

E-mail : sintiyawati432@gmail.com

No. HP : 081328384699

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Bacem
2. SMP Negeri 1 Jepon
3. MAN Blora